

POLITIK KULTURAL KH. ABDURRAHMAN WAHID DALAM DEMOKRATISASI

Subaidi

*Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsada Adisucipto Yogyakarta
Email: subaidiqamar@yahoo.com*

Abstract: Cultural politics can be used as an alternative to the institutionalization of democracy in the country that has a pluralistic nation such as Indonesia. Gait Abdurrahman KH Wahid can be recognized as part of a form of cultural politics, and one of the figures that reveal the process of democratization. Cultural politics shows that democratization as an expression of resistance an actor (agency) within the structure of power through discursive and controversial actions in the space of democracy, the cultural sphere (cultural fields) and the political sphere (political fields) into the arena game (site of the struggles and strategies), which included a scramble and fight a variety of capital (cultural capital, political capital) of the figure, the political elite in power structures in changing or maintaining a doxa. Owned capital determines the style of the game, the success or failure in the race and capital exchange. This can be seen in the reproduction of discourse conducted by Gus Dur in changing doxa.

Abstrak: *Cultural politics* sebagai salah satu bentuk pendekatan alternative dalam proses Pelembagaan demokrasi di Indonesia. Tulisan ini mengungkap bagaimana bekerjanya *cultural politics* yang dijalankan Gus Dur selama memegang posisi sebagai pemimpin nasional berperan dalam demokratisasi. Bekerjanya *cultural politics* dalam demokratisasi adalah pembongkaran hegemoni pemaknaan demokrasi melalui seorang aktor politik kharismatik dengan cara; (1) pemaknaan kembali demokrasi yang berpijak pada nilai-nilai budaya masyarakat yang komunalistik dan paternalistik, (2) mem-bergaining-kan tata nilai dalam rangka

membentuk sistem nilai yang adaptable. Peran *cultural politics* dalam demokratisasi adalah kemampuannya membangun demokratisasi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan pluralis, melalui pembongkaran hegemoni pemaknaan masyarakat yang selama ini berkembang, dengan mendramatisasi politik dalam konteks budaya dan mempolitisasi budaya dengan idea-idea politik. Hal ini dilakukan melalui tindakan kontroversial yang diskursif, sebagai pola *cultural politics* sang aktor yang unik dalam proses demokratisasi.

Kata Kunci: *Sistem Nilai, Aksi Politik, Politik Budaya*

Pendahuluan

Demokrasi yang menjadi cita-cita reformasi pasca Orde Baru tidaklah memadai jika hanya berisi pengembangan sistem secara prosedural sebagaimana ditekankan dalam pandangan liberal. Realisasi demokrasi seharusnya lebih menitikberatkan pada substansinya. Dalam hal ini, yang diperlukan adalah transformasi nilai-nilai demokrasi dalam konteks budaya setempat. Pada dasarnya demokrasi menyimpan ide-ide universal, namun perwujudannya harus berpijak pada konteks budaya setempat. Demokrasi melibatkan transformasi perilaku dan tatanan sistemik yang mengekspresikan keberpihakan kepada rakyat, menegakkan rasa keadilan, dan menjunjung tinggi etika..

Yang kita saksikan belakangan ini sungguh ironis. Demokratisasi diperlakukan sekedar sebagai modifikasi peraturan-peraturan ataupun penataan ulang sosok kelembagaan seperti lembaga perwakilan, sistem kepartaian, lembaga pemilihan umum, dan hak pilih bagi setiap warga negara. Pelembagaan demokrasi tidak memadai jika dijalankan sebagai proses *instalasi* (cara meng-install hal yang sudah dirumuskan dan diciptakan ditempat lain). Pelembagaan demokrasi liberal di negeri yang tidak bertradisi liberal seperti Indonesia ini, tentulah problematik. Cara berfikir liberal, yang pijakan dasarnya adalah individualitas, sebagaimana telah tumbuh dan berkembang di negara-negara industri maju selama ini, diasumsikan dapat menggantikan (*displacing*) nilai-nilai budaya Indonesia, seperti paternalisme

dan komunalisme. Dengan cara berfikir demikian itu, maka proses demokratisasi yang berlangsung selama ini justru menyisakan persoalan-persoalan baru, apalagi ketika penjabarannya menekankan bentuk-bentuk formal semata.

Tidak sensitifnya demokratisasi terhadap budaya setempat, justru akan melahirkan konflik-konflik yang tidak semestinya terjadi. Hal itu dibuktikan oleh hasil penelitian di berbagai negara oleh para sarjana di antaranya; Jack Snyder, guru besar Universitas Colombia dalam buku *From Voting to Violence*. Maraknya konflik berlatarbelakang suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di beberapa negara bekas komunis seperti Republik Ceko, Yugoslavia, Polandia, Hongaria, menurut kajian tersebut, disebabkan oleh pelembagaan demokrasi yang tidak sensitif terhadap budaya setempat. Temuan yang setara didapatkan dari penelitian *World Values Survey* yang dilakukan oleh Ronald Inglehart, melalui kajiannya di 65 negara (75% penduduk dunia), dituangkan dalam buku *Culture and Democracy*. Ditunjukkan bahwa demokrasi yang menjanjikan kehidupan menjadi lebih sejahtera, sebetulnya hanya sebuah ilusi. Seperti yang terjadi di negara-negara bekas Uni Soviet ketika 1991, sebetulnya rakyat lebih memilih hidup dengan pranata demokrasi, namun sampai hari ini mereka tidak lebih sejahtera. Penelitian tersebut diperkuat oleh sejumlah studi, dari Robert Kaplan, yang menyatakan bahwa sistem demokrasi dengan multi partai yang berbasis kesukuan dan agama akan menuju kehancuran seperti yang terjadi di Afrika.¹ Menurut Mancur Olson, demokrasi yang seperti itu justru melahirkan bandit-bandit yang berkeliaran dan akan menjarah negara habis-habisan seperti Rusia pasca Uni Soviet.² Setidaknya, begitu kata Amy Chua, demokrasi bisa menjadi cara mayoritas menghukum minoritas yang menguasai perekonomian seperti Indonesia.³ Hal ini dipertajam juga oleh

¹ Robert Kaplan, *The Coming Anarchy, Shattering the Dreams of the Post Cold War*, (ttp : Vintage Publisher, 2000), hlm. 11-17.

² Mancur Olson, *Power and Prosperity*. (New York; Basic books, 2000), hlm. 27-46.

³ Amy Chua, *World and Fire How Exporting Free Market Democracy, Breed Ethnic Hatred and*

Noreena Hertz yang menyatakan bahwa di negara yang paling demokratis sekalipun kebijakan politik dalam kenyataannya ditentukan oleh perusahaan-perusahaan besar.⁴ Konteks dominasi inipun penting untuk ditelaah dalam proses demokratisasi. Keraguan terhadap demokrasi yang tidak kontekstual tersebut di atas, kiranya akan mengurangi daya juang para aktivis yang berkerja tiada henti untuk demokrasi. Tetapi demokratisasi dengan ‘nalar instalasi’ akan menghasilkan tatanan yang sulit mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan transformasi melalui proses pemahaman dan pemaknaan kembali konsep dan nilai-nilai demokrasi yang selama ini populer dipraktikkan. Yang jelas, ada konteks kultural yang tidak semestinya diabaikan, namun nyatanya luput diperhatikan dalam demokratisasi di Indonesia.

Samuel Huntington dalam karyanya “*Third Wave of Democratization*” menegaskan bahwa saat ini adalah era gelombang ketiga demokratisasi, sekaligus gelombang terakhir untuk mencapai negara demokratis di seluruh dunia. Temuan dan optimisme ini disanggah oleh Giddens, bahwa gelombang ketiga itu telah mengalami “gelombang balik” yang amat meresahkan. Demokrasi harus mengalami “demokratisasi” kembali (*democratization of democracy*)⁵. Bagaimana mungkin suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila di dalamnya ada suatu kutub yang terdiri dari kelompok superkaya, penikmat privilese, kelompok minoritas yang tersingkirkan dan kelompok miskin yang terpinggirkan, di samping itu proses demokrasi (baik pemilu maupun pengambilan keputusan) makin tidak demokratis.

Studi kontemporer tentang demokrasi mengingatkan kita, kembali pada tradisi tahun 60-an yang dirintis Gabriel Almond & Sidney Verba.⁶ Kedua

Global Instability (tpp : tnp , 2000), hlm. 30-36.

⁴ Noreena Hertz, *Silent Takeover* (tpp : tnp ,2001), hlm. 25-27.

⁵ Istilah ini dipinjam dari Anthony Giddens, *The Third Way, The Renewal of Social Democracy* .(Combrige: Polity,1998), hlm. 9-10.

⁶ Gabriel Almond dan Sidney Verba adalah ilmuwan politik yang sangat berpengalaman dalam pengembangan teori *political culture*, Lihat dalam “*The Civic Culture*”, kedua tokoh ini

tokoh ini meyakini bahwa kemampuan suatu negara dalam berdemokrasi berkaitan erat dengan aktualisasi nilai-nilai, keyakinan, kepercayaan dan tradisi, yang pada umumnya sering disebut dengan kebudayaan setempat. Munculnya kembali perspektif kebudayaan sebagai variabel pengubah ditandai oleh studi L. Harrison dalam buku *Under Development is State of Mind the Latin America Case* (1985), yang menyatakan bahwa hambatan utama pembangunan, terutama pembangunan demokrasi, pada sebagian besar negara di Amerika Latin adalah “kebudayaan”. Sikap akomodatif terhadap kebudayaan hampir menjadi keniscayaan dalam demokratisasi. Calos A. Montaner dalam, *Culture and The Behavior of Elites in Latin America* (2000), mengatakan negara di Amerika Latin gagal mengkonsolidasi pranata demokrasi setelah lebih 150 tahun merdeka, karena terperangkap dalam formalisme demokrasi tanpa adanya aktualisasi nilai-nilai demokrasi yang akomodatif, yang disertai dengan transformasi dalam sistem nilai dan budaya masyarakat.

Demokrasi sebagai sebuah sistem yang dipercaya dan diyakini oleh masyarakat dunia dan juga masyarakat Indonesia sebagai sistem politik terbaik saat ini (sebagai *doxa* dalam istilah Bourdieu), karena kemampuannya meminimalis konflik menjadi sebuah tanda tanya, ketika melihat berbagai hasil penelitian di atas. Dengan demikian demokrasi sebagai salah satu persoalan yang tidak terjawab secara proporsional adalah peran tokoh kunci. Teori transisi menuju demokrasi di satu sisi melebih-lebihkan kemampuan tokoh menciptakan perubahan kultural yang disebut demokratisasi. Sementara itu kalangan strukturalis terlalu skeptik atau *understate* peranan dan kemampuan tokoh kunci, dalam hal ini Presiden, dalam menciptakan perubahan. Bagi mereka, tatanan struktural yang mampu membangun demokrasi dalam suatu negara. Memang, para aktor politik yang berada dalam posisi puncak hampir selalu menjadi variabel yang menentukan pola dan arah transisi demokrasi di setiap negara, setelah melalui proses liberalisasi. Atas dasar

membahas *political culture* yang berpengaruh pada perilaku politik dan demokrasi di lima Negara; Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia dan Meksiko.

itu, muncullah anggapan tidak ada demokrasi yang terkonsolidasi tanpa dukungan tradisi atau budaya dan nilai-nilai liberal. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tersirat bekerjanya politik kultural, dan hal ini dapat dijadikan alternatif pendekatan dalam pelebagaan demokrasi yang lebih bersifat inklusif dan sensitive terhadap kultur.

Proses demokratisasi memerlukan aktor kunci yang memiliki kemampuan untuk memahami dinamika sosial dan proses bagaimana sistem budaya, nilai dan agama dalam masyarakat menjadi pendorongnya. Sungguhpun aktor memiliki peran penting, kesadaran berdemokrasi perlu ditumbuhkan dan berpijak pada kesadaran akan kebudayaan. Kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada, perlu dijadikan referensi dan argumentasi politik dalam pengembangan budaya politik (*political culture*) tertentu. Perjuangan itu dapat kita sebut sebagai kiprah politik kultural (*cultural politics*).⁷ Tetapi masalah ini tidak ditangani dengan baik oleh para pengambil kebijakan sehingga

⁷ Istilah politik kultural digunakan oleh Donald K. Emerson dalam bukunya, *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politics*. Ia mengartikan *politik kultural* berbeda dengan istilah *political culture* (Budaya politik).. Politik kultural merupakan kenyataan di mana perbedaan-perbedaan kebudayaan dip erpolitikkan dan perbedaan politik diungkap kan dalam idiom-idiom kebudayaan. *Political culture* adalah orientasi budaya kelompok elite politik, yang sangat menentukan orientasi politik mereka sendiri dan orientasi politik masyarakat luas. Lihat dalam Donald K. Emmerson, *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politics* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1976), hlm.24-25. Sedangkan istilah politik kultural yang dimaksudkan disini adalah suatu tindakan politik seorang aktor politik kharismatik yang memiliki osisi strategis dalam struktur kekuasaan, dalam membongkar discourse kunci yang mengekang demokratisasi, atau membentur nilai-nilai penting yang cenderung diabaikan dalam proses demokratisasi atau membongkar hegemoni p emaknaan masyarakat dengan mentransforamsikan nilai-nilai demokrasi dalam sebuah ranah, baik ranah kultural maupun ranah politik dalam p raksis demokrasi. Istilah dan konsep Politik kultural yang digunakan disini dalam arti sebagaimana yang digunakan oleh Glenn Jordan and Chris Weedon, *Cultural Politik. Class, Gender, Race and the Postmodern World* dan Donald K. Emerson dalam bukunya, *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politik*, (Ithaca: Cornell University Press, 1976). Walaupun keduanya ini lebih menitikberatkan pada sifat dan karakternya. Sedangkan p enulis lebih menitik beratkan pada politik kultural seorang actor.

melahirkan berbagai ketegangan dan konflik yang berkelanjutan. Seharusnya perhatian para politisi dipusatkan pada aktualisasi dan penerjemahan kesadaran berdemokrasi menjadi kesadaran kebudayaan.

Di Indonesia, pendekatan politik kultural, sudah lama dilupakan oleh para pengkaji ilmu politik, setelah dirintis oleh R. Willeam Liddle (1970)⁸ Donald K. Emmerson (1976)⁹ dan Benedict R. O'G. Anderson (1970).¹⁰ Sejalan dengan hal itu, teoritisasi demokrasi yang populer dan menjadi acuan kebijakan bersifat proseduralistik. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan nilai, budaya dan kepercayaan tidak banyak mendapat perhatian. Asumsinya, implementasi sistem demokrasi dalam suatu negara harus mampu mengakomodir sistem nilai, budaya dan kepercayaan sebagai pendorong dalam pelebagaan demokrasi, agar supaya demokrasi mengakar dalam budaya masyarakat.

Dalam kealpaan tersebut di atas, pendekatan kultural, ternyata muncul dalam praktek, meski tidak diiringi oleh popularitas wacana teoritik yang sejalan dengannya. Penulis menduga KH. Abdurrahman Wahid (selanjutnya Gus Dur) telah memperjuangkan perwujudan demokrasi melalui aktualisasi nilai-nilainya dalam kultur masyarakat.¹¹ Pilihan terhadap Gus Dur sebagai contoh kasus dalam pelebagaan demokrasi melalui politik kultural, dikarenakan; *pertama*, ia mampu membangun gagasan demokratisasi (sebagai *beterodoxa*, istilah Bourdieu) ditengah-tengah masyarakat yang hirarkis dan paternalistik. Hal ini terlihat dalam tulisan-tulisan Gus Dur tentang pengembangan dan keharusan demokrasi yang kurang lebih mencapai 140

⁸ Lihat R. Willeam Liddle, *Ethnicity, Party, and National Integration: an Indonesian Case Study* (New Haven: Yale University Press, 1970), hlm. 31.

⁹ Donald K. Emmerson, *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politik* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1976), hlm. 11.

¹⁰ Lihat Benedict Anderson "The Idea of Power in Javanese Culture," dalam Claire Holt (ed.), *Culture and Politik in Indonesia*, (London: Cornell University, 1970), hlm. 7-8 & 50.

¹¹ Fuad Hasyim, *Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya dan INCREs, 2000), hlm. 38.

buah tulisan.¹² *Kedua*, kemampuan Gus Dur membangun jaringan dalam memperkenalkan gagasan yang kontroversial dan tidak dimengerti oleh lingkungannya itu dengan bersilatullahi (*sowan*) pada para kyai. *Ketiga*, tindakan-tindakan kultural (*culturalaction*) Gus Dur yang kontroversial¹³ dilakukan dalam rangka menjunjung nilai-nilai kemanusiaan (penegakan HAM).¹⁴ Ia melihat berbagai persoalan sosial politik di Indonesia dari dimensi kultural masyarakat dengan mensymbolisasikan persoalan politik dengan simbol-simbol budaya.¹⁵

Dari pengamatan tersebut penulis menilai bahwa Gus Dur melakukan serangkaian tindakan politik¹⁶ yang patut diperhitungkan. Ketajaman

¹² Demokrasi yang diperjuangkan oleh Gus Dur merupakan demokrasi yang menjunjung tinggi nilai pluralitas, humanitas dan egalitarian yang berpijak pada budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. *Ibid*.

¹³ *Cultural action* yang dilakukan Gus Dur itu kontroversial sehingga lebih mampu dalam mendobrak demokrasi sebagai sebuah doxa dibandingkan dengan *cultural action* yang dilakukan oleh tokoh lain yang lebih bersifat linier.

¹⁴ Lihat dalam Greg Berton, "The Impact of Neo-Modernism on Indonesian Islamic Thought: the emergence of a new pluralism", dalam David Bourchier dan John Legge (ed). *Democracy in Indonesia: 1950s dan 1990s* (Victoria: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1994), hlm. 144-147.

¹⁵ J. Kristiadi, "Sang Politikus Pembangun Demokrasi" dalam *Beyond The Symbol Jejak antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*, hlm. 38.

¹⁶ Istilah "*action*" atau "tindakan" merupakan istilah yang oleh Weber sendiri didefinisikan, sebagai: semua tingkahlaku manusia bila dan sepanjang si pelaku (melakukannya berdasarkan) makna subyektif yang diletakkannya kepada tindakan tersebut. Dengan tepatnya Talcott Parsons memberikan definisi "Aksi atau tindakan adalah sebuah proses di dalam sistem situasi si pelaku, yang mempunyai makna motivasional baginya Weber menyatakan bahwa suatu tindakan terjadi ketika seseorang sedang mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan melakukan seleksi pada cara-cara (*means*) yang dinilai tepat untuk mewujudkannya sesuai dengan situasi yang ada. Tindakan rasional merupakan metode untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan cara yang dipertimbangkan lebih tepat. Tingkahlaku manusia yang menginginkan makna hidup berupa gagasan tentang tindakan rasional dalam memahami dan menafsirkan

pemikirannya tentang politik di Indonesia yang ditelaah melalui pendekatan politik kultural memungkinkan dirinya memaknai simbol-simbol kultural dalam mencari solusi bagi persoalan-persoalan sosial politik di negeri ini.¹⁷ Dengan resiko melakukan romantisasi yang berlebihan, cukuplah alasan untuk mengatakan bahwa Gus Dur telah menempuh apa yang disebut penulis sebagai politik kultural. Tindakan politik (*political action*) Gus Dur dalam pelebagaan demokrasi yang berpijak pada nilai-nilai budaya ini penting untuk dikaji, dan studi ini dimaksudkan untuk mengkaji Bagaimana bekerjanya politik kultural (*cultural politics*) yang dijalankan Gus Dur selama memegang posisi sebagai pemimpin nasional berperan dalam demokratisasi ?. Dalam rangka menggali jawaban terhadap pertanyaan tersebut, ada sejumlah pertanyaan yang sifatnya lebih operasional; yakni: Bagaimana Gus Dur memaknai Demokrasi? Apa saja tindakan kultural, yang secara politis dipandang oleh Gus Dur penting bagi demokrasi di Indonesia? Nilai kultural apa yang digunakan sebagai acuan Gus Dur dalam menentukan tindakan politik yang diambilnya? Bagaimana reproduksi nilai-nilai demokrasi dilangsungkan melalui tindakan politik Gus Dur atau politik kultural (*cultural politics*) yang dilakukan Gus Dur berperan dalam pelebagaan demokrasi di Indonesia?

Tulisan ini secara umum bertujuan menawarkan politik kultural sebagai celah alternatif pemikiran demokratisasi. Melalui kajian ini akan tersedia acuan alternatif dalam pengembangan demokratisasi di Indonesia. Sedangkan secara spesifik; Penelitian ini memiliki beberapa sasaran; pertama, mengidentifikasi berbagai *action* yang ditengarai sebagai bentuk perwujudan

tingkah laku manusia yang dikenal dengan konsep *tipe ideal*. *Tip e ideal* memungkinkan untuk melihat sebuah kaitan yang bermakna antara nilai-nilai tertentu di satu pihak dengan suatu tindakan dalam realitas sosial. Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, (New York: Oxford University Press, 1977), hlm. 88 dan Talcott Parsons, *The Social Systems*, (New York: The Free Press, 1951), hlm. 4.

¹⁷ Tindakan-tindakan politik Gus Dur sempat menjadi kontroversi. misalnya pembelaannya terhadap kaum marjinal dan minoritas, perjuangannya dalam nasionalisme, pluralisme, humanisme, otonomi daerah, dan demokrasi..

nilai-nilai demokrasi melalui kultur masyarakat. Kedua menjelaskan konseptualisasi politik kultural (*cultural politics*) dalam tatanan politik dan pelebagaan demokrasi di Indonesia. Ketiga Bekerjanya politik kultural (*cultural politics*) sebagai model alternatif dalam pelebagaan demokrasi di Indonesia. Keempat menawarkan konseptualisasi demokrasi melalui politik kultural (*cultural politics*) tokoh .

Penelitian ini memiliki beberapa signifikansi; *Pertama*, signifikansi metodologis. Penelitian ini berusaha mengungkap politik kultural sebagai suatu pendekatan dalam pengkajian demokratisasi. Pengembangan alternatif ini penting mengingat kuatnya tuntutan bagi pelebagaan demokrasi yang melampaui standar minimalis di Indonesia, namun sejauh ini belum ada tawaran yang menjanjikan.

Kedua, signifikansi praktis. Hegemoniknya pemahaman bahwa demokrasi mengandung nilai universal, telah menghilangkan urgensi untuk mengembangkan acuan kontekstual dalam mengarungi proses demokratisasi. Mengingat keragaman kondisi kultural di Indonesia, ada kebutuhan untuk menempuh proses demokratisasi yang inklusif, akomodatif, dan transformatif terhadap nilai-nilai budaya lokal. Hanya saja, urgensi ini tidak mudah dirasakan mengingat tidak banyak kajian yang mengkaitkan demokratisasi dengan realitas kebudayaan. Kontekstualisasi ini memang beresiko akan diolok-olok pengusung universalisme demokrasi (yang sebetulnya menjadi kedok hegemoni demokrasi liberal). Melalui kajian ini, olok-olok dalam ungkapan *democracy with attribute* dapat disikapi secara lebih mapan.

Selama ini ada banyak kajian tentang demokrasi, dan tidak semuanya sepakat dengan pendekatan kultural. Sungguhpun demikian, perlu dilakukan pemetaan teori-teori demokrasi agar kajian ini terinspirasi oleh kekayaan teoritik yang tersedia. Dalam rangka melacak berbagai pijakan teoritis yang berguna untuk menjelaskan bagaimana demokrasi dan demokratisasi yang mengacu pada kondisi sosial budaya setempat, di sini akan disajikan *review* dengan mengkategorisasi kajian yang dipakai di Indonesia selama ini ke dalam kajian strukturalis, transisional, dan kulturalis. Tidak perlu dijelaskan

bahwa masing-masing pendekatan memiliki kekuatan/kegunaan sendiri, dan pada saat yang sama juga memiliki keterbatasan. Melalui pemetaan kajian demokrasi dalam ketiga kategori ini, dapat ditemukan kekhasan pendekatan kultural yang selama ini sudah dikenal, dan kekhasan itu pula yang akan menjadi acuan studi ini dalam mengungkap politik kultural.

Pendekatan Struktural (Structural Approach). Para strukturalis, seperti Seymour Martin Lipset dan Barrington Moore, mendasarkan teorisasinya tentang demokratisasi pada proses perubahan struktur kekuasaan. Mereka berasumsi bahwa penentu proses demokratisasi ditentukan oleh adanya perubahan struktur kelas, negara dan transnasional. Analisis- analisis yang disajikan menekankan bahwa pergantian keseimbangan kekuatan kelas yang menciptakan kondisi struktural yang secara historis mendukung pembangunan demokrasi. Pergantian keseimbangan kekuatan kelas mengacu pada perubahan kondisi struktural seperti hadirnya kelompok borjuis ataupun kelompok kelas menengah yang menuntut perubahan sosial, ekonomi dan politik, di mana hal tersebut pada gilirannya menentukan bagi kelangsungan demokrasi

Pendekatan Transisional (Transition Approach). Pendekatan ini merupakan pendekatan demokrasi yang bersifat proseduralistik, di mana pendekatan ini melihat aktor-aktor politik sebagai sentral dari proses demokratisasi. Secara khusus, inisiatif para elite-lah yang memainkan peran utama dalam proses demokratisasi. Demokratisasi di negara berkembang dikonsepsikan sebagai satu set lembaga dan prosedur pemerintah yang dinegosiasikan di antara para pemimpin politik. Pendekatan transisi ini merupakan model studi yang memusatkan pada peran dan strategi para aktor politik dalam memformulasikan dan menjelaskan demokratisasi. Adapun ciri-ciri pendekatan transisi antara lain sebagai berikut. *Pertama*, transisi demokrasi dimulai dari kerutuhan suatu rezim otoritarian dan terbukanya kran demokrasi dengan nilai-nilai liberal, dengan situasi dan kondisi masyarakat yang kacau balau. *Kedua*, situasi dan kondisi yang tidak menentu itu, disusul juga dengan konsolidasi demokrasi, terutama peran

para aktor-aktor politik sebagai penjelas berlangsungnya demokratisasi. *Ketiga*, dibentuknya lembaga-lembaga dan tata aturan perundang-undangan yang bercorak demokratis. *Keempat*, dalam konsolidasi demokrasi diharapkan terjadi pembiasaan (*habituation*) dalam tata aturan dan prosedur-prosedur demokrasi dalam diri para aktor dan masyarakat sehingga akan terwujud sebuah demokrasi yang diinginkan. Adapun tokoh-tokoh dalam kajian ini antara lain; Guillermo O'Donnel, Philippe Schmitter, and L. Whitehead, (1986).

Pendekatan Kultural (cultural Approach), Pendekatan ini meyakini bahwa kemampuan suatu negara dalam berdemokrasi berkaitan erat dengan aktualisasi nilai-nilai, keyakinan, kepercayaan dan tradisi, yang kesemuanya itu sering disebut dengan kebudayaan setempat. Seperti karya R. William Liddle (1970) dan Donald K. Emmerson (1976). Mereka meneliti tentang politik cultural dalam pengertian budaya di Indonesia, dengan mengasumsikan budaya sebagai prestasi peradaban yang pada dasarnya mengangkat budaya tertentu yang beradab dan menyingkirkan budaya-budaya lain yang dinilai tidak beradab. Penelitian mereka diilhami dan dipengaruhi oleh pendekatan skismatik dan aliran. Pendekatan ini paling berpengaruh dalam menjelaskan politik di Indonesia pada periode pasca kemerdekaan. Teori ini muncul dari tim peneliti *Massachusetts Institute of Tehnology* (MIT) yang melaksanakan studi etnografinya pada awal hingga pertengahan 1950-an di sebuah desa kecil di Jawa Timur, yang diberi nama samaran Mojokuto. Meskipun demikian, lebih khusus lagi teori ini telah diidentifikasi dengan tulisan Robert Jay (1955) dan Cifford Geertz (1959), Robert Jay menekankan corak skismatik hubungan Islam dan Jawa-isme, yang kemudian berkembang melampaui wilayah konfrontasi keagamaan dan memasuki wilayah politik, kebudayaan dan kehidupan sosial. Belakangan, Geertz mengembangkan skema sosial-keagamaan ke dalam pengelompokan aliran sosio-kultural dan politik.

Mereka menawarkan gagasan politik kultural, diilhami oleh masalah skisme keagamaan yang menyebabkan skisme politik yang berkembang antara santri dan abangandi Indonesia khususnya Jawa. Polarisasi kekuatan

antara ortodoksi dan sinkretisme yang ada, sebagai bentuk bertahannya corak pengelompokan sosio-kultural dan politis masyarakat Jawa, sehingga menurut kedua tokoh ini, R. William Liddle dan Donald K. Emmerson nilai-nilai politik kultural yang digunakan oleh kedua kelompok (santri dan abangan) itu berbeda, dikarenakan orientasi politik kultural yang dijadikan pijakan oleh kelompok abangan dan santri itu berbeda. Kedua peneliti ini hanya mengungkap nilai-nilai politik kultural dari para elite yang dibentuk dan dipengaruhi oleh struktur sosial, agama dan kultur dengan berpijak pada skematik dan politik aliran yang dikembangkan oleh Jay dan Geertz.

Benedict R. O'G. Anderson (1970). mengkaji politik kultural yang berpijak pada suatu pola kebudayaan tertentu, dalam hal ini budaya Jawa. Tokoh ini mengkaji politik kultural di Indonesia dari aspek kultural Jawa, khususnya struktur sosial Jawa. Ia melihat tindakan dan perilaku dari para elite merupakan suatu respon terhadap keadaan sekitar yang merupakan hasil interaksi sosial yang diilhami oleh budaya Jawa. Anderson secara tepat menjelaskan bahwa politik penguasa Orde Baru Suharto selalu menggunakan simbol dan idiom budaya Jawa. Nilai-nilai politik kultural para elite Orde Baru menurut Anderson berpijak pada *political culture* Jawa. Seperti kekeluargaan, kerukunan dan harmonisasi.

Perbedaan pendekatan dengan pendekatan yang sudah ada dan berkembang dalam kajian ilmu politik seperti structural, transisional dan cultural adalah:

1. Pendekatan struktural menegaskan bahwa kondisi-kondisi sosial, budaya dan politik terikat oleh kenyataan bahwa mereka dibentuk dan diposisikan oleh relasi-relasi dari suatu struktur-struktur yang ada. Tetapi mereka juga mengakui bahwa manusialah yang menciptakan struktur, sehingga disadari manusia juga mampu merubah kondisi-kondisi sosial, budaya dan politik sebagaimana yang ditekankan dalam pendekatan disertasi ini yaitu politik kultural. Di samping itu pendekatan struktural mengakui bahwa abstraksi sebagai keharusan bagi instrumen pemikiran dalam mengartikulasikan dan mengekspresikan realitas itu

sendiri sebagaimana dalam pendekatan politik kultural. Walaupun dalam pendekatan struktural bukan hanya abstraksi sebagai keharusan bagi instrumen pemikiran untuk menyesuaikan relasi–relasi riil, tetapi juga adanya gerakan yang berkelanjutan dan kompleks di antara level-level abstraksi yang berbeda. Oleh karena itu pendekatan struktural menekankan pada konsepsi keseluruhan atau totalitas, sedangkan pendekatan politik kultural lebih menekankan pada partikularitas radikal dari praktik-praktiknya.

2. Pendekatan politik kultural itu berbeda dengan pendekatan transisional. *Pertama*, pendekatan transisional melihat di mana aktor sentral demokratisasi berada pada inisiatif para elite yang memainkan peran utama dalam proses demokratisasi. Demokratisasi di negara berkembang dikonsepsikan sebagai satu set lembaga dan prosedur pemerintah yang dinegosiasikan di antara para pemimpin politik. Pendekatan transisi ini merupakan model studi yang memusatkan pada peran dan strategi para aktor politik dalam memformulasikan dan menjelaskan demokratisasi yang bersifat proseduralistik. Tetapi dalam pendekatan politik kultural tidak semua aktor mampu melakukannya, kecuali aktor politik yang berada dalam posisi puncak struktural kekuasaan, dan pendekatan ini tidak menekankan pada hal yang bersifat proseduralistik, tetapi lebih menekankan pada pengembangan proses demokratisasi bersifat kultural yang hidup dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, transisi demokrasi dimulai dari kerutuhan suatu rezim otoritarian dan terbukanya kran demokrasi dengan nilai-nilai liberal, dengan situasi dan kondisi masyarakat yang kacau balau.

Sama halnya dalam pendekatan politik kultural terbukanya kran demokrasi itu memungkinkan peran aktor politik dalam situasi dan kondisi tersebut mampu membongkar hegemoni pemaknaan dengan memobilisasi nilai-nilai dalam masyarakat. *Ketiga*, situasi dan kondisi yang tidak menentu, disusul dengan konsolidasi demokrasi, di mana peran para aktor-aktor politik sebagai penjelas berlangsungnya demokratisasi, seperti juga dalam peran aktor politik dalam pendekatan

politik kultural. *Keempat*, dibentuknya lembaga-lembaga dan tata aturan perundang-undangan yang bercorak demokratis. Demikian juga dalam pendekatan politik kultural, tetapi membangun demokratisasi melalui tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat itu lebih penting sebagaimana dalam politik kultural. *Kelima*, dalam konsolidasi demokrasi diharapkan terjadi pembiasaan (*habituation*) dalam tata aturan dan prosedur-prosedur demokrasi dalam diri para aktor dan masyarakat sehingga akan terwujud sebuah demokrasi yang diinginkan. Hal ini yang ditekankan dalam politik kultural, bahwa demokrasi itu harus hidup dan mengakar dalam kehidupan masyarakat.

3. Pendekatan politik kultural itu merupakan varian dari pendekatan kultural. *Pertama*, dikarenakan sama-sama mempelajari pola-pola perorganisasian yang memiliki identitas dan hubungan yang tak terduga selain diskontinuitas dalam praktek sosial. *Kedua*, berusaha mengungkap sifat pengorganisasian yang merupakan kompleks dari hubungan sosial, sehingga mampu mengetahui pola-pola karakteristik budaya yang khas. *Ketiga*, mengetahui bagaimana interaksi antara seluruh praktek dan pola pengorganisasian ini dihayati dan dialami secara keseluruhan di dalam priode tertentu. Hanya saja pendekatan kultural ini memang menekankan peran aktor politik, tetapi bukan seorang aktor kharismatik, lebih-lebih seorang aktor yang memiliki posisi puncak struktur kekuasaan.

Di sisi lain pendekatan kultural hanya melihat peran aktor sebagai agen semata, tidak melihat actor sebagai bagian dari struktur yang ada. Dengan posisinya sang aktor melalui tindakan politiknya yang kontroversial itu, baik sebagai agen maupun bagian dari struktur mampu membongkar discourse kunci yang dinilai sebagai pengekang proses demokratisasi atau membongkar hegemoni pemaknaan masyarakat tentang mainstream demokrasi dengan memobilisasi nilai-nilai melalui artikulasi kognitif maupun ekspresi sistem nilai sebagaimana pendekatan politik kultural.

Willeam Liddle (1970), Donald K. Emmerson (1976), dan Benedict R. O’G. Anderson (1970). Mereka menggunakan pendekatan politik kultural dalam pengertian kultural, dengan mengasumsikan budaya sebagai prestasi

peradaban yang pada dasarnya mengangkat budaya tertentu sebagai yang beradab dan menyingkirkan budaya-budaya lain yang dinilai tidak beradab. Contoh kecil dalam konteks Indonesia, rezim Orde Baru menjalankan politik kultural yang menganut pengertian budaya sebagai prestasi peradaban di atas dengan menciptakan kosakata utama, yakni puncak kebudayaan nasional dalam upayanya melakukan intervensi kebudayaan ke kebudayaan-kebudayaan lokal. Pengertian budaya yang digunakan oleh ketiga tokoh ini khususnya Williams lebih berada dalam ranah gagasan.

Oleh karena itu politik kultural sebagai pendekatan dalam pelembagaan demokrasi di Indonesia dalam disertasi ini berbeda dengan pendekatan para pemerhati demokrasi yang sudah berkembang dalam kajian ilmu politik. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan demokrasi yang bersifat proseduralistik, baik melalui pendekatan struktural maupun transisional itu bukan merupakan sesuatu yang sudah final dan jadi, tetapi lebih sebagai metode atau proses (*never ending process*) guna mencapai tujuan bernegara.

Maka pelembagaan demokrasi tidak hanya bisa dilakukan oleh struktur kelembagaan, tetapi juga bisa dilakukan oleh seorang tokoh (aktor politik) baik sebagai agen maupun bagian dari struktur, karena dialah yang mampu merubah kondisi-kondisi sosial, budaya dan politik bahkan struktur itu sendiri. Dengan melalui posisinya sang aktor baik struktural maupun kultural, maka tindakan politiknya itu mampu memobilisasi nilai-nilai dalam masyarakat disatu sisi. Di sisi yang lain mampu membongkar hegemoni pemaknaan masyarakat, dalam membangun kultur baru yang lebih terbuka, toleran dan menerima perbedaan serta empatif.

Dalam membaca proses demokratisasi melalui politik kultural, penulis menggunakan teori politik kultural. Proses demokratisasi sebagai fenomena sosial, merupakan produk tindakan dari sang aktor, yang mengasumsikan bahwa pemahaman dan implementasi agenda politik tertentu perlu berpijak pada kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Meminjam konsep Pierre

Boudieu,¹⁸ habitus digunakan dalam studi ini untuk melihat kecenderungan seorang aktor mendisposisikan dirinya kedalam suatu praktek tertentu. Apakah dalam habitus itu ia cenderung mendisposisikan dirinya dalam skema interpretative yang dikonstruksi oleh struktur sosial seperti NU, budaya Jawa ataunegara. Melalui konsep *habitus*, kajian ini berusaha menjelaskan koherensi hubungan konsepsi masyarakat dengan aktor, menjembatani perdebatan dikotomi antara individu dengan masyarakat; agen dengan struktur sosial; kebebasan dengan determinisme. Konsep ini memungkinkan dibangunnya teori produksi sosial aktor dan logika tindakan. Oleh karena itu keberadaan masyarakat baru dapat dipahami dengan sempurna apabila perhatiannya diberikan tidak hanya pada faktor produksi dan infrastrukturnya, melainkan juga faktor-faktor reproduksi dan berbagai supra strukturnya. Faktor-faktor reproduksi dinilai memiliki otonomi relative, mempunyai sistem tersendiri yang dapat berbeda dan bahkan bertentangan dengan faktor produksi. Apabila faktor produksi dan infrastruktur politik bekerja dalam modal politik, maka faktor reproduksi bekerja dalam kerangka model simbolik dan kultural. Hirarki sosial tidak hanya dibangun melalui akumulasi modal politik pada kelompok yang berkuasa, tetapi juga melalui akumulasi modal simbolik dan kultural.

Teori politik kultural sebagaimana konsep *habitus*, berpijak pada peran aktor baik sebagai agen maupun bagian dari struktur, antara tendensi subyektif dan struktur obyektif,¹⁹ sehingga suatu habitus yang ada itu tidak

¹⁸ Pierre Bourdieu, 1970, "Cultural Reproduction and Social Reproduction" dalam J. Karabel dan A.H.Halsey (ed.), *Power And Ideology In Education*, (New York : Oxford University Press, 1977). Kajian lebih jauh mengenai Pierre Bourdieu, baca majalah Basis, Nopember 2003, "Edisi khusus Pierre Bourdieu". Kritik serupa juga telah dilakukan Faruk terhadap disertasi Pradjara Dirdjosanjoto, 1999, *Memelihara Umat, Kyai Pesantren-kyai Langger di Jawa*, LKiS, Yogyakarta

¹⁹ David Swartz memandang bahwa metode relational- yang ditawarkan Bourdieu merupakan alat dasar untuk mendorong keterputusan epistemologis dengan bentuk pengetahuan subyektif dan obyektif. Lihat *Cultural and Power: The sociology of Pierre Bourdieu*, (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1997), hm. 62.

terlepas dari *cultural values* dan *tention, political orientation actor*, maka *habitus* di satu pihak menolak determinasi penuh dari struktur, dan pihak lain juga menolak pilihan bebas individu.²⁰ *Habitus* adalah rujukan (*referent*) yang dimiliki oleh individu untuk melakukan persepsi dan respon dengan cara tertentu terhadap dinamika perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. *Habitus* itu, karena merupakan hasil dari proses sosial, dimungkinkan oleh struktur atau ekstruktur. Akan tetapi, karena tatanan begitu dalam, *habitus* bersifat spontan dan instinktif, maka menyatu dengan obyek. Tidak sepenuhnya patuh pada struktur, melainkan dapat mengalami modifikasi sesuai dengan tuntutan yang dihadapi dan kondisi aktual pemilikinya.²¹ Maka dari tindakan politiknya itu, Gus Dur mencoba memperlakukan kehidupan sosial sebagai suatu interaksi struktur, kecendrungan (*disposisi*), dan tindakan yang saling mempengaruhi. Artinya tindakannya itu tidak didikte secara langsung oleh struktur dan orientasi-orientasi budaya, tetapi lebih merupakan hasil dari proses improvisasi yang kemudian distrukturkan oleh orientasi budaya, sejarah perorangan, dan kemampuan untuk berperan di dalam interaksi social. Struktur social dan pengetahuan tentang struktur itu menghasilkan orientasi *ajeg* bagi tindakannya yang kemudian ikut memberi bentuk bagi struktur social. Dengan demikian tindakan kultural Gus Dur itu merupakan hasil interaksi dialektis antara struktur dan pelaku, antara struktur obyektif dan representasi subyektif (*habitus*).

Habitus adalah skema-skema interpretatif yang tidak kaku, seperangkat pedoman yang longgar yang memungkinkan individu-individu berstrategi,

²⁰ Pierre Bourdieu memusatkan kajiannya pada hubungan dialektik antara struktur obyektif (Durkheimian) dengan fenomena subyektif (Weberian); senantiasa menyatakan bahwa dirinya bukan seorang Durkheimian, Weberian, Marxist, atau label apapun. Pierre Bourdieu, di mana para pengkritiknya sering digambarkan sebagai, "*wanted to integrate at least a part of satre's existentialism with Levi strauss's structuralism*" lebih jauh baca Goerge Ritzer, *Modern sociology theory*. *Ibid.*, hlm. 397-408.

²¹ Pierre Bourdieu, *In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology* (Cambridge, Polity Press, 1990), hlm. 125-126.

mengakomodasi situasi baru, dan melakukan praktek-praktek inovatif.²² Bourdieu menghindari idealisme dengan menegaskan bahwa *habitus* bukanlah penciptaan asli individu; juga bukan individu yang bebas dari kondisi-kondisi struktur sosialnya.²³ Melainkan, *habitus* adalah produksi dari kondisi-kondisi struktur sosial dari individu dan oleh karena itu *habitus* menstrukturkan praktik-praktik sosialnya melalui suatu cara yang mereproduksi kondisi-kondisi obyektif agen dari keberadaan sosialnya. *Habitus* merupakan struktur generative dari praktek-praktek sosial yang mereproduksi struktur-struktur sosial; jadi, *habitus* adalah subjektif (yang terdiri dari skema-skema interpretative) dan objektif (yang menyanggah jejak atau imprint dari struktur sosial) sekaligus; *habitus* adalah mikro (yang bekerja pada tingkat individu dan antar individu) dan sekaligus makro (produk dari dan yang mereproduksi struktur sosial). Namun *habitus* selalu bekerja dalam hubungannya dengan arena sosial (*social fields*), khususnya dalam arena budaya dan arena politik, di mana di dalamnya terdapat berbagai jenis modal (sumber daya yang berharga) diperebutkan, dipertahankan dan dipertukarkan. Nilai dalam hal ini dimaknai sebagai “sesuatu yang menjadi pola dasar bagi seluruh kehidupan serta menentukan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri serta kehidupannya”.²⁴ Dengan kata lain signifikansi suatu tindakan (*social practice*, istilah Bourdieu) Gus Dur dalam ranah demokratisasi baik posisinya sebagai agency maupun posisinya dalam struktur dapat dilihat dari dua aspek; (1) ranah kultural (*cultural fields*), di mana penekanan kepada ide-ide kognitif, yang menyebabkan tindakan politik dipandang sebagai modal kultural (*cultural capital*), (2) ranah politik (*political fields*), di mana penekannya pada sistem interaksi sosial yang sudah terstruktur atau dilembagakan, yang menyebabkan tindakan politik dipandang sebagai kapital politik (*political*

²² *Dialectic of internalization of externality and the externalization of internality*”. Diambil oleh George Ritzer dari *outline of a Theory of Practice* p 72. George Ritzer, *Modern Sociological Theory* (http: The McGraw-Hill Companies INC, 1996), hlm. 404.

²³ Pierre Bourdieu, *In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology* hlm. 65.

²⁴ Theodore M. Steeman, *Religious Pluralism And National Integration*, Ph.D. Dissertation, Harvard University, 1973, hlm. 51.

capital). Memang harus diakui bahwa, tindakan politik seorang aktor dalam posisinya sebagai agen maupun dalam struktur yang ada itu tidak terlepas dari *values* (nilai pluralisme, egalitarianism dan humanisme, yang menjadi orientasi tindakan politiknya dalam *social field* baik ranah kultural maupun politik, di mana dinamika modal kultural dan politik dipertaruhkan dalam mendobrak terjadinya perubahan sebagai sebuah bentuk reproduksi nilai-nilai demokrasi.

Dengan adanya kontroversi yang dipicu oleh tindakan politik aktor sebagai proses medekonstruksi dan merekonstruksi wacana melalui kedua modal yang dimiliki oleh Gus Dur akan menimbulkan dialektis yang dinamis antara “tindakan politik” dengan “*respons publics*”, sehingga ruang demokratisasi tercipta, yang dengan sendirinya kesempatan perubahan dapat terjadi di satu sisi dan disisi lain bisa tidak. Oleh karena itu kontroversi yang timbul itu kadangkala hilang dengan cepat dari pewacanaan yang berkembang, dan ada pula yang bergulir dengan terus menerus dan semakin mendapat dukungan publik, dan ada pula yang tidak jelas. Dengan demikian peranan politik kultural dalam praksis demokratisasi di Indonesia sedemikian penting, sehingga politik kultural menjadi suatu model pendekatan alternative dalam demokratisasi.

Dalam politik kultural, demokratisasi diasumsikan sebagai bentuk perlawanan yang digerakkan oleh aktor (*heterodoxa*) terhadap sistem demokrasi (*doxa*) di Indonesia, *positioning* aktor baik posisinya sebagai agency maupun posisinya yang berada dalam puncak struktur kekuasaan, dapat mendobrak terjadinya perubahan dengan membongkar *discourse* kunci yang dinilai sebagai pengekang proses demokratisasi atau membongkar struktur kelembagaan yang hegemonik, membongkar pemaknaan demokrasi yang kaku melalui tindakan strategisnya (*social practice*, istilah Bourdieu), dalam sebuah ranah di mana dinamika modal kultural dan modal politik diperebutkan; (1) untuk memperoleh kepemilikan volume modal dan kepemilikan komposisi modal, (2) perjuangan untuk mendefinisikan apa yang berharga dalam sebuah ranah, (3) untuk mengontrol modal yang paling berharga dalam proses

demokratisasi di Indonesia dengan memobilisasi nilai-nilai sebagai bentuk reproduksi nilai-nilai demokrasi yang sensitive kultur..

Pandangan Hidup KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Gus Dur melakukan demokratisasi dengan berpijak pada nilai-nilai budaya yang sudah mengakar dan melebur dalam masyarakat, seraya membangun wacana perlawanan dalam membongkar hegemoni pemaknaan masyarakat dalam mengekspresikan gagasan demokrasi yang diyakini. Kajian ini didedikasikan untuk membuktikan hal ini. Dengan kematangannya dalam ilmu sosial, antropologi dan pemahaman keagamaan yang kuat, ia mampu melebur nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu menjadi sebuah nilai-nilai modern dalam rangka membangun demokratisasi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, pluralis, egaliter dan humanis. Point yang perlu digarisbawahi di sini adalah, justru kemampuannya membangun nilai dan wacana untuk menarik perhatian publik dan melibatkan diri dalam kontroversi pewacanaan itulah tindakan politik Gus Dur memiliki makna. Sehubungan dengan hal itu, deskripsi tentang Gus Dur dan kiprahnya dalam hal ini didasarkan pada kemampuan pewacanaan dan kesaksian dan riak yang ditimbulkan oleh pewacanaan yang diungkit Gus Dur.

Sosok Gus Dur sebagai tokoh demokrasi (aktor) yang berpegang dan berpijak pada nilai-nilai tertentu yang dijunjung tinggi, seperti pluralisme, humanism dan egalitarianisme diyakini menjadi obsesi dalam orientasi politik. Maka nilai-nilai itu niscaya yang mendasari perjuangannya, dan pada gilirannya nanti menjadi penjelas dari bekerjanya politik kultural yang dilakukan dalam posisinya sebagai tokoh kunci baik sebagai agency maupun bagian dari sturktur negara. Berbicara tentang nilai, yang dimengerti sebagai penilaian yang bersifat reflektif tentang apa yang berharga dan apa yang penting di dalam hidup dan segala sesuatu yang dianggap membentuk suatu kehidupan yang baik dan bermakna”,²⁵ adalah sesuatu yang tidak terpisahkan

²⁵ Theodore M. Steeman, “Religious Pluralism and National Integration”, Ph.D Dissertation, Harvard University, 1973, hlm. 52.

dari *religi*, yang di sini dipahami sebagai “sesuatu yang memberikan kepada seseorang makna hidup yang paling tinggi”²⁶ dan “yang menentukan pola dasar bagi seluruh kehidupan serta menentukan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri serta kehidupannya”.²⁷

Oleh karena nilai-nilai itu berakar pada sebuah pemahaman mengenai “kenyataan di balik semua kenyataan” atau “teologi antroposentris transendental”, yaitu suatu bentuk kesadaran bahwa Allah yang memiliki kuasa, menentukan di dalam peristiwa-peristiwa manusiawi dan yang mempunyai nilai intrinsik pada dirinya.” Konsepsi ketauhidan (*Allah al Khaliq*) itulah yang memberikan pola legitimasi baik untuk struktur-struktur sosial maupun kehidupan sehari-hari. Ia memberikan “logika” bagi tingkah laku sosial. Maka dengan demikian, nilai itu terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat, mengenai hal-hal yang dianggap bernilai dalam hidup. Karena itu, nilai biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi dalam perilaku manusia.

Dalam mengungkap nilai-nilai yang mengobsesi dalam orientasi politik Gus Dur sebagai pendukung dan pejuang demokratisasi.²⁸ Sehingga ia dinilai sebagai orang yang berwatak pluralis, egaliter dan humanis. Penulis akan menunjukkan bahwa Gus Dur merupakan salah seorang yang pluralis, egaliter (menghormati persamaan) dan humanis. Hal ini didasarkan pada gagasan makro (arus utama) yang menjadi titik tolak dari pemikiran dan tindakan politiknya sejak 1980 - sampai menjadi presiden yang selalu berpijak pada visi politik Indonesia yang plural, egaliter dan humanis.²⁹ Hampir dapat dikatakan bahwa semua tindakan Gus Dur baik berupa *texts*, *talk* dan *behaviour* itu sendiri tetap menunjukkan pola yang sama, yaitu komitmennya

²⁶ *Ibid.*, hlm. 46.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

²⁸ Douglas E. Ramage, *Politik Indonesian: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance*, (London :Routledge, 1995), hlm 34.

²⁹ Lihat dan bandingkan dengan Douglas E. Ramage yang mengatakan; pemikiran Gus Dur itu didasarkan pada visi politik Indonesia yang demokratis, sekuler dan nasionalis. *Ibid.*

pada problem pluralitas(keagamaan dan budaya), kemanusiaan, ke-Indonesia-an dan demokratisasi. Kalaulah setelah menjadi pemimpin nasional ia kerap menunjukkan sisi politiknya, itu hanya menjadi bagian panjang dari komitmen besarnya menciptakan tatanan ke-Indonesia-an yang demokratis. Adapun gagasan besarnya yang banyak ditulis dan diekspresikan melalui tindakan-tindakannya sejak tahun 1980- sampai menjadi presiden dapat penulis klasifikasikan sebagaimana di bawah ini;

Tabel I

Teks	Tema	Jumlah
Teks 1	Pluralisme Agama	72
Teks 2	Pribumisasi Islam	43
Teks 3	Finalitas Negara Bangsa Pancasila	73
Teks 4	Humanitarianisme Universal	72
Teks 5	Keharusan demokrasi	140

Sumber: Redaksi INCRoS (2000:38)

Pemikiran dan tindakan Gus Dur selama ini, khususnya ketika menjadi presiden akan bisa menggambarkan konsepsinya mengenai masyarakat demokratis yang pluralis, egaliter dan humanis. Salah satu pemikiran dan keyakinan intinya adalah, Indonesia benar-benar menjadi *civil society* yang demokratis, aspirasi politik masyarakat tidak boleh disalurkan melalui agama. Untuk mendukung tujuan-tujuan demokratis dan sosialnya, Gus Dur lebih sering menggunakan ideologi Pancasila ketimbang Islam untuk melegitimasi partisipasinya dalam wacana politik dan dalam mengekspresikan gagasan-gagasan kunci politiknya. Kajian terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi seperti pluralisme(dalam pendirian Fordem, mengaku sebagai keturunan Cina), egalitarianisme atau persamaan hak menjadi pemimpin (dalam penentangan terhadap haramnya pemimpin wanita), maupun egalitarianisme dalam perbedaan dan kebebasan (dalam pencabutan Tap MPRS/ N0 XXV/1966 tentang komunisme),nilai-nilai

humanisme (dalam perubahan Irian ke Papua, dan penentangan hegemoni negara terhadap agama atau arogansi mayoritas terhadap minoritas) menunjukkan gagasan politiknya yang pluralis, egaliter dan humanis.

Gus Dur sebagai representasi generasi pemikir Islam revolusioner di Indonesia, di mana Greg Barton menyebutnya sebagai pemikir neo-modernis.³⁰ Salah satu ciri yang menandai pemikiran neo-modernisnya itu adalah komitmennya pada pluralisme, egalitarianisme, humanisme dan nilai-nilai inti demokrasi. Selain itu, nilai-nilai tersebut dirajut ke dalam struktur iman dan Islam sebagai nilai inti Islam itu sendiri.³¹

Demokrasi menghendaki adanya kebebasan yang berangkat dari pluralitas, baik sosial, politik, budaya, bahkan juga agama. Namun demikian, agama tidak diperkenankan menampilkan sosok yang eksklusif dan menakutkan. Isu pluralitas dan demokrasi dalam Islam merupakan sesuatu yang strategis dan fundamental untuk menjawab persoalan bangsa, terutama karena dengan pluralitas dan demokrasi dapat mempersatukan kekuatan-kekuatan bangsa. Demokratisasi dapat mengubah keterceraiberaian arah masing-masing kelompok, bersama-sama menuju kedewasaan, kemajuan dan integritas bangsa. Jika Islam dapat memperjuangkan pluralitas dan demokrasi, maka akan dapat menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga bagi masa depan bangsa.³²

Gus Dur baik sebagai aktor politik maupun bagian dari suatu struktur merupakan sosok fenomenal yang memiliki karakter yang unik dengan sejumlah gagasan dan tindakan politik yang kontroversial. Hal ini

³⁰ Greg Berton, "The Impact of Neo-Modernism on Indonesian Islamic Thought: the Emergence of a New Pluralism", dalam David Bouchier dan John Legge, ed. *Democracy in Indonesia: 1950s dan 1990s* (Clayton, Victoria: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1944), hlm. 144-147.

³¹ *Ibid.*, hlm. 147.

³² Wawancara Ali Masykur Musa dengan Abdurrahman Wahid, 7 Maret 1992, lihat dalam Ali Masykur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik GusDur* (Jakarta, Erlangga, 2010), hlm. 129.

dimungkinkan karena kemampuannya dalam mengakomodir antara budaya dan tradisi yang berkembang dan hidup dalam masyarakat dengan nilai-nilai demokrasi seperti, pluralisme, persamaan, humanisme sebagai nilai-nilai yang universal. Kedua nilai-nilai budaya dan tradisi ini melebur dalam kehidupannya sehingga mampu mengobsesi dirinya untuk bersifat reflektif, membumi, penghayatan terhadap realitas yang senantiasa bermotifkan transformative dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang membentuk karakteristik Gus Dur di tengah perpolitikan Indonesia, yaitu 1). Nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan dalam budaya Jawa, 2). Mengedepankan masalah dengan berpegang pada nilai-nilai universalis Islam dan tradisi para ulama yang berpegang pada konstruksi fikih, karena Gus Dur merupakan produk pendidikan pesantren yang ajaran utamanya adalah fikih .

Pengaruh budaya Jawa, dan budaya Sunni yang terakumulasi dalam kaidah fikih para ulama' memegang peranan penting dalam setiap perilaku politik Gus Dur. Ruang yang luas untuk melakukan kreatifitas interpretasi politik memang diciptakan oleh doktrin Sunni. Hal ini sangat menguntungkan Gus Dur, yang rasional dan liberal, untuk menciptakan manuver politiknya baik dalam bentuk diskursus maupun aktivisme. 3). Orientasi akomodatif dan menjadikan ulama' sebagai panutan di dalam keselarasan hidup. 4) diperkuat dengan penghayatannya terhadap nilai-nilai demokrasi, sebagai tujuan perjuangan Gus Dur.

Maka demokrasi menurut Gus Dur adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai perbedaan dan kebebasan berpendapat menjadi kunci utama. Semua orang memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi secara politik yang berazaskan kepentingan bersama. Dalam demokrasi semua tampil setara dan sama, berkesempatan yang sama dalam mempengaruhi proses politik yang berjalan. Semua dipandang sebagai warga negara dengan hak sipil dan politik yang sama. Dan ini memerlukan aksentuasi nilai keadilan. Keadilan berarti menjamin persamaan perlakuan dan kesempatan dalam politik maupun kultural.

Oleh karena itu menurut Gus Dur politik kultural (*cultural politics*) merupakan strategi dan salah satu bentuk pendekatan dalam melakukan tindakan dan kebijakan politik yang sensitive terhadap konteks dan budaya lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Gagasan dan konsep demokrasi dan politik kultural Gus Dur sebagai sebuah wacana dan gerakan dipengaruhi oleh:

1. Strategi wacana dan gerakan yang bersifat sosial, dalam arti melakukan kegiatan dakwah dengan dasar pengabdian yang ikhlas dan cuma-cuma.
2. Strategi kooperasi terbatas (*limited cooperations*) dengan kaum penguasa, dalam arti meskipun bersikap menentang penguasa, tetapi tetap memperhatikan keselamatan bangsa, organisasi dan jamaah di bawah tekanan kekuasaan.

Membuka Pintu Perubahan

Seseorang dinilai dan diyakini memiliki komitmen tinggi terhadap demokrasi bilamana ia berani mengambil keputusan yang tidak lazim atau tidak populer demi keyakinannya. Tindakan tersebut, bisa jadi tidak mudah dimengerti oleh orang kebanyakan. Namun jika tindakan tersebut memiliki konsistensi dengan tindakan lainnya yang sejenis, maka ia dapat disebut seorang demokrat sejati. Dalam studi ini, akan mengungkap bagaimana makna tindakan politik kontroversial Gus Dur dalam ruang demokrasi?, bagaimana bekerjanya tindakan kontroversial ini dalam politik budaya dan bagaimana respon publik?. Gus Dur sebagai aktor maupun bagian dari suatu struktur, selama menjabat sebagai presiden memperjuangkan perubahan demi aktualisasi nilai-nilai demokratisasi negeri ini secara lebih bermakna walaupun dengan mempertaruhkan jabatannya sebagai presiden. Dalam posisinya sebagai presiden Republik Indonesia, ada sejumlah tindakan politik tidak populer tetapi memiliki signifikansi diskursif dalam membongkar discourse kunci yang mengekang demokratisasi, melalui pemaknaan kembali demokrasi di satu pihak dan mem-bergain-ing-kan tata nilai dalam rangka membentuk sistem nilai demokrasi yang adaptable di pihak lain. Oleh karena itu *action* kontroversial yang bersifat diskursif itu

sebagai bentuk kegelisahannya terhadap sosio-politik yang berkembang selama ini. *Action*-nya seakan-akan selalu mengandung magnet, respons dan reaksimasyarakat yang dengan sendirinya muncul, baik yang pro maupun kontra, sehingga *action* itu seolah-olah pemicu konflik di kalangan masyarakat. Tetapi sebenarnya dalam dialektika, bahwa kontroversi yang berlangsung itu sebagai sebuah proses dekonstruksi dan rekonstruksi wacana, yang pada akhirnya mengendap sebagai kearifan, kearifan dalam praksis demokrasi. Hal ini menunjukkan kuatnya komitmen berdemokrasi dalam dirinya.

Positioning Gus Dur sebagai aktor kharismatik semakin mendapat perhatian publik. walaupun kontroversial ini bisa saja karena aktor itu suka usil dan tampil beda, atau berkontroversi merupakan bagian dari dinamika kehidupannya ataukah kontroversi itu sebagai pintu perubahan dalam membangun semangat berdemokrasi melalui perbedaan pendapat secara terbuka dalam ruang publik. Jika kontroversi itu sebagai pintu perubahan, maka sang aktor itu dimungkinkan akan mampu mengungkap persoalan-persoalan discourse kunci yang dinilai sebagai pengekang proses demokratisasi lebih mendalam dibandingkan dengan cara-cara yang bersifat linear. Di samping itu sang aktor juga mampu melakukan berbagai perubahan dengan berbagai macam tindakan yang dinilai akan mampu memberikan semangat dalam berdemokrasi. Proses pembelajaran dari perbedaan pendapat itu akan mampu membangun pluralitas, humanitas dan egalitarian dalam berbangsa dan bernegara. Tetapi proses medekonstruksi dan merekonstruksi wacana dengan tindakan yang kontroversial dari segala perangkat struktural yang baku, yang dinilai mengekang, kalau bukan mematikan daya kreatif masyarakat dalam proses demokratisasi juga mengantarkan pada suatu situasi yang anarkhis ketika kontroversi yang dilakukan sang aktor seolah tidak mau tahu dengan hal-hal yang bersifat struktural, kebencian, sinisme sejumlah orang terhadapnya. Di sisi lain *positioning* aktor kharismatik ini memungkinkan terciptanya hegemoni baru dalam mendekonstruksi proses demokratisasi.

Oleh karena itu proses dekonstruksi dan rekonstruksi wacana dengan pola kontroversial ini memang akan membawa perubahan lebih cepat dari cara-cara yang linear. Untuk kepentingan jangka panjang pola kontroversi ini memang memperbaiki pembelajaran, membantu seseorang melihat titik pandang orang lain, meningkatkan Tetapi pola ini seringkali diwarnai dengan kejutan politis dan terobosan yang mencengangkan. Langkah-langkah politik sering mengejutkan dan manuver politik dari kontroversi tersebut tidak mudah dimengerti oleh umum. Maka dengan pola tersebut diperlukan manajemen yang baik dengan gaya kepemimpinan yang rasional agar supaya tidak tercipta hegemoni baru dan anarkhisme di sisi lain.

Oleh karena itu *action* kontroversial Gus Dur sebagai fenomena proses dialektika budaya dalam sebuah demokratisasi, pada dasarnya hal itu merupakan proses negoisasi pemaknaan secara baru. Pembaruan makna terus menerus itulah sebagai bentuk dari praksis demokrasi itu sendiri. Semua itu sebagai proses kultural dalam membangun demokratisasi dalam suatu kultur yang pluralis, menghormati perbedaan dan persamaan serta menjunjung nilai-nilai humanitas dalam berbangsa. Hal ini tidak terlepas dari sistem politik demokrasi yang dikembangkan di Indonesia; pelembagaan demokrasi yang proseduralistik dan institusionalistik, pembenturan proses demokratisasi dengan agama mayoritas (Islam), determinasi negara terhadap agama, sentralistik, arogansi elits dan status qua, yang melahirkan struktur-strukturkelembagaan yang hegemonik dan kaku. Di samping itu proses demokratisasi juga tidak dibarengi oleh pembangunan nilai-nilai demokrasi yang berpijak pada nilai-nilai budaya dan tradisi yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, serta menumbuhkan pemahaman dan kesiapan mental masyarakat untuk siap berdemokrasi, sehingga pelembagaan demokrasihanya sekedar modifikasi peraturan-peraturan ataupunpenataan ulang sosok kelembagaan.

Maka bekerjanya tindakan-dirkursif kontroversial yang dijalankan Gus Dur baik sebagai aktor maupun bagian dari sebuah struktur, selama memegang posisi sebagai pemimpin nasional mampu membongkar

discourse kunci yang dinilai sebagai pengekan proses demokrasi dengan cara; (1) membangun seperangkat nilai dan wacana dalam melawan status quo dan dominasi praksis demokrasi proseduralistik dan institusionalistik yang dominan. (*beterodoxa* dalam istilah Bourdieu). (2) memaknai kembali demokrasi dengan berpijak pada nilai-nilai budaya masyarakat yang komunalistik dan paternalistik, (3) mem-bergaining-kan tata nilai yang ada (nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai budaya lokal) dalam rangka membentuk sistem nilai demokrasi yang adaptable dalam kontek Indonesia. Hal itu dapat ditelaah dan diungkap dalam beberapa *action* Gus Dur sebagai aktor yang menjadi contoh kasus dalam penelitian ini dalam membangun seperangkat nilai dan pewacanaan dalam mengconter status quo dan dominasi praksis demokrasi.

Komitmen Gus Dur terhadap demokrasi dapat dilihat dalam tindakan politik yang dilakukan dalam merekonstruksi nilai-nilai yang menjadi pengekan demokratisasi, sehingga *action* tergambar sebagai bentuk dari aktualisasi nilai-nilai (pluralitas, egalitarinitas dan humanitas). Dari sini akan terlihat bahwa tindakan politik actor sebagai hasil interaksi dialektis antara agen dan struktur itu merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap system demokrasi (*doxa*) melalui pembangunan seperangkat nilai dan pewacanaan dalam sebuah ranah di mana berbagai jenis modal diperebutkan dan dipertaruhkan. Bab ini akan menjelaskan tentang ranah apa saja yang digunakan untuk memainkan modal-modal tersebut dalam melakukan perubahan terhadap system demokrasi yang kurang sensitive terhadap kmontek dan kultur local. Dari pemaparan ini akan nampak kekuatan mana yang sesungguhnya mampu menguasai setiap ranah dalam ruang sosial, mana tindakan politik Gus Dur yang berhasil dan mana yang gagal dalam perebutan dan pertukaran modal.

Perubahan Habitus

Perubahan dan transformasi suatu habitus yang dilakukan oleh Gus Dur dengan tindakan politiknya itu, sebagai bentuk perlawanan terhadap sstem demokrasi yang proseduralistik- institusionalistik yang dominan

(*doxa*) di negara ini dan kurang sensitifnya terhadap kultur masyarakat. Ia mencoba memperlakukan kehidupan demokrasi sebagai suatu interaksi struktur, baik struktur demokrasi itu sendiri maupun struktur budaya dan tradisi masyarakat yang saling mempengaruhi. Tindakan kultural Gus Dur itu merupakan hasil dari proses improvisasi yang kemudian distrukturkan oleh nilai budaya, pengalaman, orientasi politik dan kemampuannya untuk berperan di dalam interaksi sosial. Struktur sosial dan pengetahuan tentang struktur yang dimiliki oleh Gus Dur itu menghasilkan orientasi *ajeg* bagi tindakannya yang kemudian ikut memberi bentuk bagi struktur sosial. Dengan demikian tindakan kultural Gus Dur itu merupakan hasil interaksi dialektis antara struktur dan pelaku, antara struktur obyektif dan representasi subyektif

Perubahan habitus yang dilakukan oleh Gus Dur dalam suatu ranah dalam melawan aplikasi system demokrasi yang kurang sensitivenya terhadap konteks dan kultur lokal (*doxa*) tersebut, memunculkan pertemuan berbagai jenis modal yang tidak dapat dihindarkan. Ketika modal yang dimiliki oleh seorang aktor seperti Gus Dur, para elite politik dan publik bertemu dalam sebuah ranah, maka masing-masing pihak akan memainkan modalnya tersebut dengan strateginya masing-masing sehingga ia mampu melakukan penguasaan terhadap yang lain.

Setidaknya ada dua ranah dalam ruang sosial yang dimiliki oleh Gus Dur, di mana terjadi pertemuan yang hebat antara modal-modal tersebut. Kedua ranah tersebut adalah; *pertama*, ranah kultural sebagai bentuk pertarungan simbolik, yaitu pengetahuan. *Kedua* ranah politik, yaitu pertarungan akan politik representatif, akomodatif dan politik simbol.

Forum Demokrasi (FOR-DEM)

Kelahiran organisasi ikatan cendekiawan muslim Indonesia (ICMI) dinilai sebagai fenomena sosio-politik yang mengancam terwujudnya sebuah tatanan demokrasi dengan bangkitnya sebuah sektarianisme yang dimotori oleh kelompok-kelompok Islam dengan dukungan, kalau bukan diprakarsai

pemerintah. Hal itu merupakan bentuk-bentuk yang akan mengikis pluralitas dalam sistem demokrasi, dan akan berkembang intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, arogansi mayoritas terhadap minoritas, dan sikap nasionalisme yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa ini akan terkikis dan hilang.

Sebagai tokoh intelektual Islam, Gus Dur mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap pembentukan ICMI. Pembentukan ICMI pada bulan Desember 1990 juga mendorong pembentukan Fordem. Maka pada bulan maret 1991 Gus Dur bersama sejumlah tokoh mendirikan forum demokrasi (Fordem), yaitu suatu organisasi yang bukan asosiasi formal, tetapi hanya sebuah kelompok diskusi atau kelompok kerja yang terdiri sekitar 45 orang intelektual terkemuka, terhormat dari latar belakang agama, akademik dan politik pro-demokrasi seperti Marsillam Simanjuntak dan Bondan Gunawan dan lain sebagainya. Fordem kemudian memainkan peran penting sebagai pusat alternative saluran politik rakyat di samping partai politik. Fordem juga berperan signifikan sebagai representasi kaum intelektual pro-demokrasi yang menolak upaya penguatan sektarianisme agama dan golongan. Dengan demikian Gus Dur dan gerakan pro-demokrasi, sebagai oposisi dan menjadi ancaman serius bagi pihak penguasa (pemerintah).

Pembentukan Fordem itu memiliki dua tujuan. Pertama, didorong oleh keinginan untuk memerangi intoleransi keagamaan dan kesukuan. Peristiwa yang paling mengganggu bagi mereka yang tergabung dalam Forum adalah kasus *Monitor* pada bulan oktober 1990 sebagai contoh bagaimana beberapa kelompok dalam masyarakat Indonesia ingin memanipulasi isu-isu agama untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan mereka. Hal ini ditunjukkan dengan keyakinan beberapa orang seperti Gus Dur bahwa ICMI merupakan contoh utama eksploitasi politik terhadap agama yang mengutamakan kepentingan kelompok 'eksklusif' yang sempit di atas kepentingan nasional. Dengan mengedepankan kepentingan Islam, ICMI mengembangkan visi Indonesia yang tidak demokratis. Hal itu akan 'mengalienasi non-muslim' dan kalangan muslim nominal dan dengan

demikian ‘memperburuk pembelaan dan salah paham yang sudah kuat dalam masyarakat selama ini antara kelompok keagamaan, kesukuan dan budaya yang berbeda, terutama bila Islam dilihat berupaya memanipulasi pemerintahan hanya untuk keuntungannya sendiri.

Kedua, adalah untuk mendorong ‘mengembalikan komitmen pada kesatuan nasional’. Bagi Gus Dur, Fordem merupakan salah satu sarana untuk mendorong proses integrasi nasional melalui eliminasi terhadap kelompok-kelompok yang berorientasi-sektarian. Ia juga menegaskan bahwa Fordem mendukung Pancasila. Douglas E. Ramage menulis bahwa Gus Dur sebagai pemimpin organisasi Islam secara terbuka menggunakan Pancasila sebagai wahana menyampaikan pesan-pesan politiknya yang bersifat kompleks dan mencakup berbagai sasaran keprihatinan: Islam, demokratisasi, dan peranan tentara dalam kehidupan politik. Karena nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan Gus Dur merupakan nilai-nilai hidup dalam masyarakat sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila.

Keterlibatan pemerintah dalam pendirian ICMI disesalkan oleh Gus Dur, sebagai bentuk keterlibatan pemerintah dalam kebangkitan sektarianisme dan manipulasi isu-isu rasial dan keagamaan demi kepentingan politik jangka pendek. Namun, ia menyatakan keyakinannya bahwa mayoritas orang Indonesia yang diam bersikap pluralistik dan toleran terhadap keberagaman. Kekakuan kebijakan pemerintahlah yang mengantarkan pada represi (terhadap suatu pendapat) dan represi inilah kemudian yang menyebabkan sektarianisme. Ia khawatir orang-orang Indonesia keturunan Cina akan menjadi sasaran frustrasi orang-orang muslim terhadap otoritarianisme Orde Baru.

Respons Publik: Pluralitas dalam Berbangsa dan Bernegara

ICMI lahir untuk menjawab kebutuhan yang berkembang di kalangan umat dan bangsa saat itu, dikarenakan adanya ketimpangan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia berada dalam posisi marjinal di berbagai

kehidupan. Kesadaran akan hal tersebut mendorong para cendekiawan, yang dimotori para mahasiswa Universitas Brawijaya, bergerak mengubah keadaan melalui kepemimpinan Prof. BJ.Habibie yang mampu menerobos berbagai hambatan dan mendapat dukungan kalau bukan diprakarsai dari presiden Soeharto. Dengan berbagai kendala dalam proses yang alot dan menegangkan, akhirnya ICMI dapat dideklarasikan pada bulan desember 1990 di Malang. Oleh karena ICMI yang secara terbuka didukung, kalau bukan diprakarsai oleh pemerintah. Gus Dur menyebutnya sebagai kecendrungan “*re-konfessionalisasi*” politik dan merosotnya toleransi keagamaan dengan terjadinya kasus *Monitor*. Dalam pandangan Gus Dur, ICMI pada hakikatnya mengabsahkan eksklusivisme Islam dan dapat merendahkan toleransi kaum muslimin terhadap masyarakat non-muslim di Indonesia. Bahkan kritik dan ketidaksetujuan Gus Dur terhadap ICMI ini disampaikan melalui humor dengan memplesetkan ICMI dengan ikatan cendekiawan miskin Indonesia. Hal itu terdorong oleh munculnya peristiwa kasus *Monitor* pada bulan oktober 1990. Kasus *monitor* menurut Gus Dur menunjukkan bahwa beberapa kelompok dalam masyarakat ingin memanipulasi isu-isu agama untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan mereka. Di samping itu Gus Dur juga melihat semakin meningkatnya pengaruh sektarianisme dan fundamentalisme di Indonesia, sehingga ia menganggap perlu menekankan adanya Islam yang lebih toleran terhadap kemajemukan, dan tentu saja bersifat non-sektarian.

Tindakan Gus Dur dalam mendirikan Fordem itu sebagai bentuk ketidaksejuannya terhadap terbentuknya ICMI pada 1990 di Universitas Brawijaya Malang. Gus Dur tanpa basa-basi menyerang ICMI sebagai kelompok intelektual yang akan menjual nama Islam saja. Bahkan memplesetkan ICMI sebagai Ikatan Cendekiawan Miskin Indonesia. Ketidaksetujuan ini dikarenakan akan menumbuhkan bentuk-bentuk sektarianisme, di samping itu label muslim dalam akronim ICMI tidak lebih dari stempel untuk mengesahkan agenda politik golongan Islam tertentu.

Gus Dur memandang ICMI tidak hanya menciptakan faksionalisme sosial antara komunitas beragama, tetapi juga antar sesama muslim. Tindakan Gus Dur ini mendapat respon dan reaksi dari berbagai pihak baik dalam kalangan pemerintah, dalam hal ini para menteri dan perwira senior ABRI seperti Laksamana (Purn) Sudomo, Menko Polkam pada tahun itu, dan Kapuspen ABRI Brigader Jendral Nurhadi, memberikan reaksi dan merespon berdirinya Fordem. Kalangan anggota ICMI menilai tindakan Gus Dur itu berlebihan dalam menanggapi terbentuknya ICMI. Sedangkan media seperti Tajuk Kompas merespon tindakan Gus Dur dalam pendirian Fordem telah membuka ruang dialog antara yang pro dan kontra. Wacana publik ini telah mampu menciptakan ruang dalam proses demokrasi di Indonesia.

Ranah Budaya: Pertarungan Simbolik (*knowledge*)

Pendirian Fordem ini sebagai bentuk penghadangan manufer ICMI. Fordem yang anggotanya berasal dari berbagai faksi social, dibentuk untuk mengartikulasikan komitmen Gus Dur terhadap kekuasaan refresifnya penguasa Orde Baru. Berbagai ganjalan penguasa terhadap kegiatan Fordem membuktikan akan sikap kritisnya terhadap penguasaordem menginseminasikan semangat perlawanan damai (*peaceful opposition*) dari kalangancendikiawan terhadap hegemoni Soeharto. Gus Dur melalui Fordem ingin memelopori terbentuknya gerakan oposisi terhadap tirani dan refresi kekuasaan. Sekalipun kepeloporan tersebut tidak terpublikasikan, pembentukan Fordem menandai awal dari munculnya gerakan oposisi Formal, sebelum formalisasi gerakan reformasi terbentuk di awal 1998. Perlu diketahui bahwa gerakan perlawanan social terhadap sebuah rezim selalu ditandai dengan terjadinya desersi kelompok cendikiawan yang sudah terhegemoni oleh kekuasaan. Kelompok cendikiawan ini, bekerja samadengan berbagai faksi sosial lainnya, akan selalu berusaha mengeliminir sebuah kekuasaan rezim yang dinilai refresif.

Penolakan Gus Dur terhadap pembentukan ICMI dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa pendirian ICMI dengan patronase penguasa merupakan

pengebirian terhadap kenetralan politik para anggotanya. Penghegemonian terhadap komunitas cendekiawan bermakna pemberangusan terhadap fungsi kontrol mereka terhadap kekuasaan. Karena itu secara moral ICMI ikut bertanggung jawab terhadap semakin meluasnya eskalasi tirani politik soeharto pada era 1990an. Mereka tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai penyadar moralitas (*the guardians of morality*) rezim Orde Baru. Sebagai kelompok yang sudah terkooptasi oleh kekuasaan, mereka memang dituntut untuk bisa bersinergi dengan penguasa. Karena itu jatuhnya soeharto dalam logika politik dapat juga diartikan dengan ketidakberdayaan ICMI untuk menghadang proses keterpurukan moralitas politik para penguasa. Bukti dari ambruknya moralitas tersebut adalah bahwa Indonesia dinyatakan sebagai negara terkorup di dunia.

Ranah Politik: Memainkan Politik Akomodatif

Pendirian Fordem ini sebagai bentuk penolakan Gus Dur terhadap formalisme institusional (ICMI) yang didasarkan pada perhitungan eksese sosial yang ditimbulkannya. Gus Dur tidak mau Islam mengemuka dalam bentuk symbol luarnya, tetapi menghendaki penyerapan terhadap substansi ajaran Islam dapat menciptakan kapasitas untuk mengakomodir realitas perbedaan dalam kehidupan ini. Keinginan untuk melihat Islam yang bisa bersinergi dengan perbedaan dalam kehidupan ini menjadi landasan gagasannya Gus Dur tentang Islam kultural. Sebagai pencetus konsep Islam kultural, Gus Dur tentu tidak membiarkan formalisme symbol tumbuh di Indonesia. Gus Dur ingin mengadopsi pendekatan kultural para Walisongo. Seperti diketahui bahwa Islamisasi di Indonesia berlangsung dengan damai, karena para wali tidak menggunakan simbol-simbol eksklusif Islam (Arab). Mereka mengintegrasikan ajaran Islam kedalam verbalisme symbol lokal. Mereka mereduksi aksentuasi symbol eksklusif Arab tersebut, untuk memperpendek jarak transformasi makna ajaran Islam yang kompleks ke alam fikiran masyarakat. Masyarakat muslim Indonesia akhirnya memang dikenal sebagai komunitas yang paling sedikit penyerapannya terhadap simbol eksklusif Arab (*the least Arabized muslims*)

Reproduksi Sistem Nilai dalam Rute Demokrasi Alternatif

Demokratisasi yang dilakukan oleh seorang tokoh dapat dinilai sebagai bentuk perubahan suatu habitus, apabila ia mampu membangun seperangkat sistem nilai dan pewacanaan yang dapat medekonstruksi dan merekonstruksi wacana yang secara diam-diam telah menjadi perangkap struktural yang baku. Bekerjanya berbagai wacana yang selama ini justru mengekang, kalau bukan mematikan daya kreatif masyarakat dalam proses demokratisasi, justru perlu dibongkar dengan mengembangkan wacana tandingan yang dapat merebut perhatian publik. Karena selama ini salah satu persoalan dalam system demokrasi yang tidak terjelaskan secara proporsional adalah peran tokoh kunci. Teori transisi menuju demokrasi di satu sisi melebih-lebihkan kemampuan tokoh menciptakan perubahan kultural yang disebut demokratisasi (*beterodoxa*). Sementara itu kalangan strukturalis terlalu skeptik atau *understate* peranan dan kemampuan tokoh kunci, dalam hal ini Presiden, dalam menciptakan perubahan, karenahanya strukturalah yang mampu membangun demokrasi dalam suatu negara. Memang, para aktor politik yang berada dalam posisi puncak hampir selalu menjadi variabel yang menentukan pola dan arah transisi demokrasi di setiap negara, setelah melalui proses liberalisasi. tetapi tidak ada demokrasi yang terkonsolidasi tanpa dukungan tradisi atau budaya lokal, disamping nilai-nilai liberal. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, politik kultural yang dinilai dapat mendialektiskan peranan agen dan struktur dalam proses demokratisasi dapat dijadikan alternatif dalam pelembagaan demokrasi yang lebih bersifat inklusif dan sensitive terhadap kultur.

Perubahan yang dilakukan oleh Gus Dur sebagai aktor maupun sebagai bagian dari suatu struktur NU, budaya Jawa, dan negara, dengan mendisposisikan dirinya ke dalam skema praktek atau tindakan tertentu dalam sebuah *social fieds* sebagai salah satu bentuk reproduksi sistem nilai demokrasi yang terlembagakan di Indonesia. Hal ini akan menunjukkan adanya kecendrungan tokoh ini untuk terlibat secara teratur dalam tindakan atau praktek-praktek tertentu yang diintegrasikan dan dibentuk dalam

lingkungan tertentu. Seperangkat tindakan atau praktek dan pewacanaan yang dibangun oleh aktor ini mampu dinegosiasikan dalam interaksinya dengan aktor-aktor lain dalam *social fields*.

Oleh karena itu disposisi tokoh tersebut dapat dilihat dari seberapa besar kepemilikan volume modal dan seberapa banyak kepemilikan komposisi modal yang dimilikinya dalam sebuah ranah, di mana berbagai modal tersebut dinegosiasikan dengan para tokoh dan elite politik yang lain dalam memperebutkan kuasa dari suatu perubahan sosial. Maka bukan hanya seperangkat aksi atau tindakan yang dapat dinegoisasikan dan dikontestasikan dalam pertukaran modal di dalam ranah, di mana berbagai kelompok aktor meningkatkan akumulasi modalnya, tetapi yang lebih penting adalah pertarungan di mana modal akan mampu mendefinisikan dan mengaktualisasikan demokrasi dalam politik kultural (*nomos* dalam istilah Bourdieu) sebagai bentuk pandangan tokoh ini dalam merefleksikan kepentingan, dan posisinya dalam sebuah ranah.

Dengan demikian tokoh ini dalam melakukan perubahan suatu habitus sebagai bentuk reproduksi sistem nilai demokrasi, memerlukan kemampuan untuk memahami dinamika sosial dan proses bagaimana sistem budaya, nilai dan agama dalam masyarakat menjadi pendorongnya. Kesadaran berdemokrasi perlu ditumbuhkan dan berpijak pada kesadaran akan kebudayaan. Kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada, perlu dijadikan referensi dan argumentasi politik dalam pengembangan budaya politik (*political culture*) tertentu. Perjuangan itu dikenal sebagai kiprah politik kultural (*cultural politics*). Sayangnya, masalah ini tidak ditangani dengan baik oleh para pengambil kebijakan sehingga melahirkan berbagai ketegangan dan konflik yang berkelanjutan. Seharusnya perhatian para politisi dipusatkan pada aktualisasi dan penerjemahan kesadaran berdemokrasi menjadi kesadaran kebudayaan. Oleh karena itu proses reproduksi sistem nilai yang dilakukan oleh seorang tokoh melalui suatu tindakan diskursif dan kontroversial sebagai pewacanaan bukanlah suatu tindakan-tindakan yang instrumental atau mekanistik, tetapi bagaimana tokoh ini menerapkan dengan cara yang

menguntungkan secara strategis dan kadang inovatif. Dengan kata lain bagaimana perubahan yang dilakukan melalui tindakan diskursifnya itu mampu mendialektiskan hubungan antara struktur sosial dan habitus itu bersifat dinamis dan dialektis dalam suatu praksis demokrasi yang sensitive kultur.

Reproduksi Sistem Nilai Dalam Praktek Demokrasi

Melalui tindakan politik yang diskursif dan kontroversial sebagai bentuk interaksi dialektis antara agen dan struktur yang berlangsung melalui proses normalisasi, maka lahirlah wacana diskursif sebagai wacana perlawanan dan perubahan yang diproduksi oleh Gus Dur. Wacana itu dikemas sedemikian rupa melalui tindakan kontroversialnya itu, yang diharapkan mampu membongkar discourse kunci yang dinilai sebagai pengekang dalam proses demokratisasi atau membongkar hegemoni pemaknaan tentang mainstream demokrasi, Tindakan kontroversial Gus Dur ini sebagai bentuk reproduksi nilai-nilai demokrasi yang diharapkan terlembagakan dalam proses demokrasi di Indonesia. Maka dengan demikian penulis akan membaca bahwa tokoh ini telah melakukan reproduksi sistem nilai demokrasi yang diusahakan terlembaga dalam proses demokrasi di Indonesia dari tindakan-tindakannya dalam *social fields* dengan cara yang menguntungkan secara strategi dan inovatif melalui; (1) wacana humanisme, egalitarianisme dan keadilan sebagai modal kultural Gus Dur. (2) wacana kesadaran kultural: upaya menciptakan masyarakat demokratis, sebagai modal politik. (3) wacana persaudaran sebagai modal simbolik..

Penulis melihat tokoh ini memosisikan praktek demokrasi benar-benar pada konteks konflik sosial dalam hubungannya dengan kekuasaan. Sementara ia bersikap kritis terhadap upaya memisahkan kebudayaan dari masyarakat dalam mempraktekan demokrasi. Tetapi ia juga kritis terhadap pandangan yang mereduksi dan menganalisa kebudayaan semata-mata sebagai cara untuk mengalamiahkan dan menjadikan wajar ketidaksetaraan sosial yang berbasis kelas. Hal ini tentu saja merupakan bagian dari pembahasan tentang konsep demokratisasi kultural politik yang dilakukan oleh tokoh ini.

Dalam mengungkapkan bagaimana reproduksi sistem nilai demokrasi yang dilakukan oleh tokoh melalui tindakan diskursif dan kontroversialnya terlembagakan dalam proses demokrasi di Indonesia. Sehingga demokratisasi melalui politik kultural dapat terlihat sebagai bentuk alternatif dan terobosan baru dalam pelebagaan demokrasi yang sensitive kultur. Kalaulah demokrasi menyimpan ide-ide universal, tetapi perwujudannya harus berpijak pada konteks budaya setempat. Oleh karena itu, reproduksi sistem nilai-nilai demokrasi yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia dalam pelebagaan demokrasi yang sensitif kultur, tidak hanya suatu sistem nilai yang mampu menjamin kebebasan advokasi, tetapi juga memiliki nuansa etis yang mampu menjaga lahirnya keadilan, melalui transformasi nilai-nilai politik yang bersifat mikro, perilaku yang mengekspresikan nilai pluralitas, humanitas dan persamaan dalam struktur sosial dan budaya yang paternalistik dan hirarkis seperti di Indonesia.

Hal tersebut di atas terjadi karena mekanisme demokrasi membuka ruang dialog secara seimbang dan sejajar dari semua pihak, walaupun akhirnya tidak terjadi kesepakatan. Karena demokrasi tidak selamanya menuju pada kesepatan, tetapi yang lebih tinggi adalah munculnya pemahaman dan penghargaan atas nilai-nilai pluralitas, egalitarian dan humanisme itu sendiri. Demokrasi dapat diwujudkan jika masih terbuka ruang yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang bebas dan berdaulat dengan berpegang pada nilai-nilai demokrasi yang berpijak pada budaya dan tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dengan catatan tidak dalam situasi dominatif-hegemonik, karena demokrasi yang berpijak pada kharisma ketokohan seorang aktor dimungkinkan menciptakan hegemonik baru atau anarkhisme di sisi lain, ketika hal itu tidak dikelola dengan baik.

Dari berbagai tindakan Gus Dur seperti mendirikan Fordem, merangkul Megawati dan mengubah Irian Jaya menjadi Papua, terpapar secara jelas bagaimana aktor politik (Gus Dur) selama menjabat sebagai presiden sebagaimana telah dipaparkan, melakukan perlawanan terhadap sistem demokrasi yang kurang sensitif terhadap kultur lokal dan memperjuangkan

perubahan dengan mereproduksi sistem nilai-nilai demokrasi demi aktualisasi nilai-nilai demokrasi negeri ini secara lebih bermakna. Tokoh ini melihat kehidupan sosial sebagai sebuah medan pertarungan setiap individu anggota masyarakat atau kelompok sosial, untuk melakukan perubahan dengan mereproduksi system nilai-nilai demokrasi, baik dalam penguasaan volume modal dan akumulasi modal politik, modal kultural, maupun modal simbolik. Dalam pertarungan itu, tingkat kekuatan anggota masyarakat tersebut amat ditentukan oleh *habitus* mereka masing-masing. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah arena (*fields*) melalui kapital budaya, kapital politik dan kapital simbolik. Faktor struktur kekuasaan, pesantren, NU, LSM dan sarana lainnya oleh Gus Dur, dapat dimasukkan sebagai modal politik. Faktor pengetahuan dalam ilmu sosial, politik dan agama beserta cara tranmisinya merupakan modal kultural. Faktor ikatan darah dan pertalian sebagai seorang kyai dengan organisasi massa serta organisasi politik tertentu; merupakan modal simbolik

Wacana Humanisme, Egalitarianisme dan Keadilan dalam Ranah Kultural

Dalam pelebagaan demokrasi di Indonesia, isu-isu humanisme, egalitarianisme dan keadilan selalu menjadi fokus perhatian. Untuk menjawab hal tersebut, demokratisasi yang dilakukan oleh seorang aktor melalui tindakan-tindakan kontroversialnya telah menjadi *panecea*-nya dan menjadi wacana tandingan dalam melakukan suatu perubahan berbagai wacana yang selama ini justru mengekang, kalau bukan mematikan daya kreatif masyarakat dalam proses demokratisasi. Namun demikian demokratisasi yang dilakukan oleh Gus Dur itu berada dalam ruang demokrasi, di mana ranah kultural (*cultural fields*) dan ranah politik (*political fields*) menjadi ajang permainan (tempat berlangsungnya perjuangan dan strategi) Gus Dur, di mana modal yang dimiliki menjadi penentu gaya permainan, keberhasilan atau kegagalan. Dalam ranah kultural dan ranah politik yang dipakai oleh Gus Dur itu dalam mengubah doxa melalui modal kultural dan modal politik dalam ruang demokrasi, ada yang berhasil dan ada yang gagal dalam

perebutan dan pertukaran modal. Hal ini dapat dilihat dalam reproduksi pewartakan yang dilakukan oleh Gus Dur dalam merubah doxa.

Pendirian Fordem sebagai reproduksi pewartakan system nilai demokrasi dalam mengartikulasikan komitmen tokoh ini (Gus Dur) terhadap kekuasaan refresifnya penguasa Orde Baru. Berbagai ganjalan penguasa terhadap kegiatan Fordem membuktikan akan sikap kritisnya terhadap penguasa. Fordem menginsinivasikan semangat perlawanan damai (*peaceful opposition*) dari kalangan cendikiawan terhadap hegemoni Soeharto. Gus Dur melalui Fordem ingin memelopori terbentuknyagerakan oposisi terhadap tirani dan refresi kekuasaan. Sekalipun kepeloporan tersebut tidak terpublikasikan, pembentukan Fordem menandai awal dari munculnya gerakan oposisi Formal, sebelum formalisasi gerakan reformasi terbentuk di awal 1998. Perlu diketahui bahwa gerakan perlawanan sosial terhadap sebuah rezim selalu ditandai dengan terjadinya desersi kelompok cendikiawan yang sudah terhegemoni oleh kekuasaan. Kelompok cendikiawan ini, bekerja sama dengan berbagai faksi sosial lainnya, akan selalu berusaha mengeliminir sebuah kekuasaan rezim yang dinilai refresif.

Penolakan Gus Dur terhadap pembentukan ICMI dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa pendirian ICMI dengan patronase penguasa merupakan pengebirian terhadap kenetralan politik para anggotanya. Penghegemonian terhadap komunitas cendikiawan bermakna pemberangusan terhadap fungsi kontrol mereka terhadap kekuasaan. Karena itu secara moral ICMI ikut bertanggung jawab terhadap semakin meluasnya eskalasi tirani politik soeharto pada era 1990an. Mereka tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai penyadar moralitas (*the guardians of morality*) rezim Orde Baru. Sebagai kelompok yang sudah terkooptasi oleh kekuasaan, mereka memang dituntut untuk bisa bersinergi dengan penguasa. Karena itu jatuhnya soeharto dalam logika politik dapat juga diartikan dengan ketidakberdayaan ICMI untuk menghadang proses keterpurukan moralitas politik para penguasa. Bukti dari ambruknya moralitas tersebut adalah bahwa Indonesia dinyatakan sebagai negara terkorup di dunia.

Wacana Kesadaran Kultural: Upaya menciptakan Masyarakat demokratis dalam ranah Politik

Salah satu ciri bahwa seorang tokoh telah melakukan praktek politik cultural dalam proses demokratisasi, apabila proses demokratisasi berpijak pada kemampuan untuk memahami dinamika sosial dan proses bagaimana sistem budaya, nilai dan agama dalam masyarakat sebagai pendorong. Kesadaran berdemokrasi tumbuh dan berpijak pada kesadaran akan kebudayaan. Kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada, perlu dijadikan referensi dan argumentasi politik dalam pembangunan demokrasi.

Gus Dur dalam membangun pewacanaan melalui tindakan diskursif dan controversial, tidak hanya merumuskan gagasannya dalam membangun demokratisasi di Indonesia seperti diuraikan di atas (modal budaya), tetapi juga berhasil membangun jaringan dengan para tokoh-tokoh Islam seperti para kyai di berbagai pesantren di Indonesia, juga tokoh-tokoh agama lain seperti Kristen, Hindu dan Buda bahkan dengan Konghucu. Tokoh ini sering sekali melakukan kunjungan ke berbagai pesantren dalam rangka silaturahmi atau membangun jaringan baik antar pengurus NU maupun antar komunitas pesantren untuk mengkomunikasikan nilai-nilai demokrasi dalam bahasa santri-kyai. Tokoh ini juga berhasil membangun jaringan dengan para intelektual yang berjuang menegakkan demokrasi di Indonesia dengan mendirikan Fordem sebagai bentuk penguatan *civil society* yang berfungsi *balance* bagi pemerintah yang otoriter pada saat itu. Di samping itu tokoh ini juga membangun jaringan dengan kelompok-kelompok minoritas seperti etnis Thionghua maupun kelompok Kristen, Hindu dan Buda. Jaringan yang dibangun oleh tokoh ini tidak hanya terbatas di kalangan tokoh-tokoh agama, intelektual dan komunitas termarginalkan, tetapi juga dengan penguasa, seperti Soeharto, Habibi, dan birokrasi militer. Oleh karena melalui modal politik ini mampu menanjapkan kekuasaan dan pengaruhnya dalam pengembangan demokrasi di Indonesia.

Tindakan sang tokoh itu tidak terlepas dari upaya melestarikan dan meningkatkan pengakuan sosial, legitimasi, kehormatan dan kekuasaan

melalui reproduksi persepsi dan apresiasi yang cocok dengan budaya bangsa Indonesia, dan menghasilkan nilai-nilai yang sensitive kultur dalam pelebagaan demokrasi di Indonesia. Pewacanaan yang dilakukan oleh sang tokoh dengan mengatakan "saya mencalonkan presiden karena saya direstui oleh para kyai di kampung-kampung" sebagai sebuah simbol yang berperan membuka ruang komunikasi dan interpretasi terhadap tanda-tanda yang disembarkannya. Hal ini bertujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat Indonesia bahwa demokrasi tidak terkungkung dalam proses formal-proseduralistik yang mengabaikan budaya dan tradisi paternalistik dan komunalistik yang berkembang di masyarakat

Oleh karena itu peran pewacanaan dalam mereproduksi sistem nilai-nilai demokrasi baik sebagai struktur-struktur yang membentuk (*structuring structures*) maupun sebagai struktur-struktur yang dibentuk (*structured structures*) dan seringkali berperan sebagai instrumen dominasi dalam mengenalkan sistem nilai-nilai demokrasi yang lebih sensitive kultur yang ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Memang modal simbolik yang dilakukan oleh tokoh ini bisa menjadi kekuatan magis guna membuat individu, kelompok atau masyarakat tertarik dan minimal ingin tahu tentang tindakan tokoh ini sebagai suatu bentuk reproduksi sistem nilai demokrasi dalam melembagakan demokrasi di Indonesia yang sudah terdominasi oleh sistem nilai-nilai formal proseduralistik demokrasi. Ketika bangsa ini didominasi oleh sistem nilai-nilai demokrasi yang jauh atau kurang sensitive kultur dan diterima begitu saja, atau tidak menyadari pemaksaan yang ditanamkan oleh simbol-simbol lembaga formal, maka mereka sebenarnya telah terdominasi oleh sistem simbol-simbol demokrasi proseduralistik. Tokoh ini melawan dominasi itu dengan menciptakan sistem simbol agar mampu menyeimbangkan sistem dominasi yang ada, agar supaya masyarakat Indonesia sadar dalam suatu proses demokrasi yang berpijak pada budayanya sendiri.

Konsep Demokratisasi Politik Kultural Tokoh; Sebuah Alternative dalam Pelembagaan demokrasi

Setelah membaca konseptualisasi politik kultural Gus Dur yang dilihat dari nilai-nilai yang mengobsesi dan menjadi pegangan dalam tindakan politiknya, makna tindakan politik yang diskursif dan kontroversial serta reproduksi sisten nilai demokrasi yang diharapkan terlembaga dalam proses demokrasi di Indonesia, maka dapat menjadi gambaran dan pijakan bahwa demokrasi ala politik kultraltokoh seperti Gus Dur dapat dijadikan alternative dalam pelembagaan demokrasi di Indonesia.

Demokratisasi ala politik kultural tidak hanya sebagai pengembangan sistem secara prosedural yang akan terjebak dalam sebuah hegemoni, sebagaimana dalam demokrasi proseduralistik. Di sisi lain rekonstruksi dan dekonstruksi yang dilakukan oleh sang aktor dalam membongkar discourse kunci yang dinilai mengekang proses demokratisasi atau mem-bergainingkan tata nilai (antara nilai-nilai demokrasi dan budaya local) memungkinkan munculnya anarkhisme. Demokratisasi ini tidak berada dalam kedua posisi itu karena lebih menekankan pada hal-hal sebagai berikut;

1. Pelembagaan demokrasi yang dilakukan oleh agen tidak hanya dinilai sebagai bentuk formulasi tata aturan kelembagaan melalui pengisian ruang kekuasaan oleh elite-elite politik, tetapi lebih menekankan aktualisasi nilai-nilai demokrasi dalam kontek budaya lokal dengan melalui kekuasaan aktor-aktor politik.
2. Praksis demokratisasi yang inovatif, yang lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat mikro politik. Di mana prilaku politik merupakan interaksi antar individu, kelompok masyarakat yang ada melalui nilai-nilai budaya dan tradsisi yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.
3. Ekspresi nilai-nilai demokrasi sebagai bentuk transformasi dalam kontek lokal, dalam rangka membongkar discourse kunci yang membelenggu proses demokratisasi, membongkar struktur yang hegemonikserta membongkar pemaknaan masyarakat tentang demokrasi yang selama ini menimbulkan bias. Pembongkaran sekat-sekat yang bersifat struktural,

baik struktur kelembagaan maupun struktur budaya yang menghambat proses demokratisasi

4. Demokratisasi berbasis *maqashid syari'ah* (tujuan syari'at Islam). Demokratisasi sebagai salah satu bentuk komitmen dan perjuangan terhadap pluralisme, humanisme dan egalitarianisme dalam konsep demokrasi adalah pilihan logis yang dinilai sebagai salah satu dimensi dalam ajaran Islam. Di mana demokrasi adalah implementasi dari ajaran agama itu sendiri, tanpa menyebutkan formulasinya dalam formalisasi agama.

Oleh karena itu demokratisasi melalui politik kultural ini sebuah demokrasi yang tidak terjebak dalam hegemoni baru dalam pemaknaan dan pengaplikasian demokrasi. Di sisi lain demokrasi ini sangat menentang adanya anarkisme dalam melakukan dekonstruksi sebagai proses wacana dalam berdemokrasi. Maka demokrasi ala politik kultural ini sebagai bentuk mendemokraskan demokrasi yang tidak terjebak dalam hegemoni demokrasi³³ dan aplikasidemokrasi yang melahirkan bentuk-bentuk anarkisme di sisi lain.³⁴

Demokratisasi yang dilakukan oleh Gus Dur dapat dinilai sebagai bentuk perlawanan dan perubahan terhadap suatu *doxa*. Sadar akan posisi strategisnya sebagai kekuatan pemicu perubahan budaya, Gus Dur telah berhasil memicu perubahan *doxa* dalam demokrasi di Indonesia melalui politik pewacanaan. Ia mampu membangun seperangkat sistem nilai dan pewacanaan yang dapat medekonstruksi dan merekonstruksi wacana yang secara diam-diam telah menjadi perangkat struktural yang baku. Melalui serangkaian tindakan seperti 1) Mendirikan Forum Demokrasi, 2) Merangkul

³³ Meminjam istilah yang digunakan oleh Anthony Giddens Demokrasi harus mengalami "demokratisasi" kembali (*democratization of democracy*) dalam *The Third Way, The Renewal of Social Democracy*

³⁴ Lihat Robert Kap lan, *The Coming Anarchy, Shattering the Dreams of the Post Cold War*, (tp: Vintage Publisher 2000), hlm. 234.

Megawati dan berkunjung ke beberapa pesantren, 3) Mengembalikan nama Papua untuk Irian Jaya, 4) Mengusulkan pencabutan Tap MPRS N0 XXIV/1966, 5) Mengaku sebagai keturunan China, 6) Memakai celana pendek (katok kolor) di depan istana) sebagai diskursus kontroversial yang memicu bekerjanya berbagai wacana, seperti sektarianisme, diskriminasi (dalam gender, agama dan kewarganegaraan), dehumanisasi dan ketidakadilan, telah dilucuti daya kekang terhadap perubahan dengan mengembangkan wacana tandingan yang dapat merebut perhatian publik. Perubahan yang terlihat antara lain adalah munculnya *balance of power* dengan munculnya oposisi dan *civil society*, pluralisme, kesetaraan dan persamaan (dalam gender, agama dan kewarganegaraan) dan humanisme. Pada gilirannya, perubahan yang dihasilkan mengendap menjadi normalitas baru, terlihat dari *action* kontroversial Gus Dur sebagai fenomena proses dialektika budaya dalam sebuah demokratisasi, pada dasarnya hal itu merupakan proses negosiasi pemaknaan secara baru. Pembaruan makna terus menerus itulah sebagai bentuk dari praksis demokrasi itu sendiri.

Demokratisasi dalam konteks ini adalah proses adaptasi secara terus-menerus melalui negosiasi makna yang dari waktu ke waktu dipicu oleh tindakan-tindakan unik aktor kunci. Pembenturan nilai demokrasi dan mencairnya wacana dalam bidang-bidang tertentu di atas itu adalah kontribusi penting.

Penutup

Cultural politics dapat dijadikan rute alternatif dalam pelebagaan demokrasi bagi negara yang memiliki bangsa yang mejemuk seperti Indonesia. Kiprah KH Abdurrahman Wahid (Gur Dur) dapat dicerna sebagai bagian dari bentuk *cultural politics*, dan salah satu tokoh yang mengungkap proses demokratisasi dalam rute alternatif tersebut. Dengan mengambil inspirasi dari konsep *teori habitus* dan *doxa* yang ditawarkan Pierre Bourdieu, *cultural politics* memperlihatkan bahwa demokratisasi sebagai ekspresi perlawanan seorang aktor (*agency*) yang berada dalam struktur kekuasaan melalui tindakan diskursif dan kontroversialnya dalam ruang demokrasi, dengan ranah kultural

(*cultural fields*) dan ranah politik (*political fields*) menjadi ajang permainan (tempat berlangsungnya perjuangan dan strategi), di mana di dalamnya terdapat perebutan dan pertarungan berbagai modal (modal kultural, modal politik) dari para tokoh, elit politik di struktur kekuasaan dalam mengubah atau mempertahankan suatu *doxa*. Modal yang dimiliki menjadi penentu gaya permainan, keberhasilan atau kegagalan dalam perebutan dan pertukaran modal. Hal ini terlihat dalam reproduksi pewacanaan yang dilakukan oleh Gus Dur dalam merubah *doxa*.

Upaya Gus Dur untuk mengembangkan seperangkat sistem nilai dan pewacanaan yang dimaksudkan untuk medekonstruksi dan merekonstruksi wacana yang secara diam-diam telah menjadi perangkap struktural yang baku, terlihat bahwa kontroversi pewacanaan yang diungkit ini justru memungkinkan sang aktor akan mampu mengungkap dan membongkar persoalan-persoalan yang selama ini tidak disadari. Langkah-langkah kunci tersebut menggulirkan simpul-simpul perwacanaan di seputar hal yang dinilai sebagai pengekang proses demokratisasi secara heboh namun pada saat yang sama menjangkau hal yang lebih mendalam dibandingkan dengan cara-cara konvensional yang bersifat linear. Proses dekonstruksi dan rekonstruksi wacana melalui tindakan kontroversial aktor kunci itu, menjadikan transformasi nilai-nilai demokrasi telah berhasil dilakukan dalam; menginsiminasikan lahirnya oposisi formal, kesetaraan wanita dan pria dalam kepemimpinan politik, perubahan Papua dengan lahirnya undang-undang otonomi khusus, mencairnya hegemoni negara terhadap agama serta diterimanya warga China sebagai bagian dari bangsa ini. Walaupun sebagian kecil tindakan kontroversial aktor kunci ini tidak berhasil, seperti ide pencabutan tap MPRS no XXV/1966 dan tindakan merakyatnya dengan pakaian katok kolor di istana negara baik sebagai bentuk transformasi kelembagaan maupun sebagai bentuk protes dari arogansi mayoritas elite terhadap minoritas di parlemen.

Proses demokratisasi dalam politik kultural telah menunjukkan bahwa teori demokrasi yang sedang menjadi mainstream acuan praktik pemerintahan

selama ini memiliki sejumlah kelemahan dalam system demokrasi di Indonesia yang tidak ter jelaskan secara proporsional adalah peran tokoh kunci. Teori transisi menuju demokrasi di satu sisi melebih-lebihkan kemampuan tokoh menciptakan perubahan kultural yang disebut demokratisasi (*heterodoxa*). Sementara itu kalangan strukturalis terlalu skeptik atau *understate* peranan dan kemampuan tokoh kunci, dalam hal ini Presiden, dalam menciptakan perubahan, karenanya strukturalah yang mampu membangun demokrasi dalam suatu negara. Memang, para aktor politik yang berada dalam posisi puncak hampir selalu menjadi variabel yang menentukan pola dan arah transisi demokrasi di setiap negara, setelah melalui proses liberalisasi. Tetapi tidak ada demokrasi yang terkonsolidasi tanpa dukungan tradisi atau budaya lokal, disamping nilai-nilai liberal.

Teorisasi demokratisasi yang mampu mendialektiskan secara dinamis antara *agent centered* dan *structure centered*, yaitu teori demokratisasi politik kultural di mana peran seorang aktor (*agency*) yang berada dalam struktur kekuasaan, seperti presiden memiliki peran strategis dan signifikan yang tidak hanya dimungkinkan dapat melakukan suatu perubahan terhadap doxa, melainkan juga dapat membangun seperangkat sistem nilai demokrasi yang lebih sensitif terhadap kultur dan kontek lokal bangsa Indonesia yang mejemuk. Dengan demikian demokratisasi *cultural politics* merupakan demokrasi *tawasuthiyah* (demokrasi jalan tengah) antara hegemoni-proseduralistik dan demokrasi yang memberikan kebebasan berekspresi yang dapat menimbulkan anarkhisme, antara *agent centered* dan *structure centered*

Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict "The Idea of Power in Javanese Culture," dalam Claire Holt (ed), *Culture and Politik in Indonesia*, London: Cornell University, 1970.
- Awartz, David, *Cultural and Power: The sociology of P ierre Bourdieu*, Chicago & London: The University of Chicago Press, 1997.

- Berton, Greg, "The Impact of Neo-Modernism on Indonesian Islamic Thought: the Emergence of a New Pluralism", dalam David Bouchier dan John Legge (ed), *Democracy in Indonesia: 1950s dan 1990s*, Clayton, Victoria: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1994.
- Berton, Greg, "The Impact of Neo-Modernism on Indonesian Islamic Thought: the Emergence of a New Pluralism", dalam David Bouchier dan John Legge (ed). *Democracy in Indonesia: 1950s dan 1990s*, Victoria: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1994.
- Bourdieu, Pierre, "Cultural Reproduction and Social Reproduction" dalam J. Karabel dan A. H. Halsey (ed), *Power And Ideology In Education*, New York : Oxford University Press, 1977.
- Bourdieu, Pierre, *In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology*, Cambridge, Polity Press, 1990.
- Chua, Amy, *World and Fire How Exporting Free Market Democracy, Breed Ethnic Hetret and Global Instability*, ttp : tnp, 2000.
- Emmerson, Donald K., *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politics*, Ithaca and London: Cornel University Press, 1976
- Giddens, Anthony, *The Third Way, The Renewal of Social Democracy*, Combrige: Polity, 1998.
- Hasyim, Fuad, *Beyond The Symbol Jejak antropologis pemikiran dan Gerakan Gus Dur*, Jakarta: P T Remaja Rosdakarya dan INCREs, 2000.
- Hertz, Noreena, *Silent Takeove*, ttp: tnp, 2001.
- Kaplan , Robert, *The Coming Anarchy, Shattering the Dreams of the Post Cold War*, ttp : Vintage Publisher, 2000.
- Musa, Ali Masykur, *Pemikiran dan Sikap Politik GusDur*, Jakarta: Erlangga, 2010.

- Olson , Mancur, *Power and Prosperity*. New York; Basic Books, 2000.
- Ramage, Douglas E ., *Politics in Indonesian: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance*, London: Routledge, 1995.
- Ritzer, George, *Modern Sociological Theory*, ttp: The McGraw-Hill Companies INC, 1996
- Steeman, Theodore M, “Religious Pluralism And National Integration”, Ph.D. Disertation, Harvard University, 1973.
- Weber, Max, *The Theory of Social and Economic Organization*, New York: Oxford University Press, 1977 Parsons, Talcott, *The Social Systems*, New York: The Free Press, 1951.
- Willeam, Liddle R., *Ethnicity, Party, and National Integration:an Indonesian Case Study*, New Haven: Yale University Press, 1970.